



VOLUME XI / NO. 110 / NOVEMBER 2016

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

APBN YANG REALISTIS

Pemerintah mengajukan postur APBN 2017 dengan asumsi makroekonomi dan besaran target pembangunan yang realistis.
Membangun negeri dengan semakin optimistis.



ISSN 1907-6320

Daftar Isi



Foto Cover Anas Nur Huda	5 DARI LAPANGAN BANTENG	LAPORAN UTAMA
	6 EKSPOSUR	13 Anggaran Realistis Membuat Pasar Optimis
	10 LINTAS PERISTIWA	16 Infografis
		18 Tahun Konsolidasi Fiskal
		21 Belanja Tepat Tingkatkan Manfaat
		23 Memperkuat APBN, Menjaga Tulang Punggung Negara
		REPORTASE
		25 Menkeu dalam Pertemuan World Bank-IMF Annual Meetings 2016
		26 Kemenkeu Gelar JILSE 2016
		WAWANCARA
		27 Rawat Anak Dengan Kasih Sayang
		POTRET KANTOR
		30 Lebih Semangat di Gedung Baru

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Moh. Firdaus Rumbia. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Sulastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Budi Sulistyio, Yeti Wulandari, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Dendi Amrin, Sri Moeji S., Muhammad Hijrah, Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, R. Mukiwihando. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Eva Lisbeth, Danik Setyowati, Novita Asri, Amelia Safitri, Faisal Ismail, Krisna Pandu Pradana, Joko Triharyanto, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Akbar Saputra, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Dovan Wida Perwira, Shera Betania, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Nur Muhlisim, Fita Rahmat, Syahrul Ramadhan, Muhammad Fabhi Riendi, Hesti Sulistiowati. **Redaktur Foto:** Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Priharyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Muchamad Ardani. **Desain Grafis dan Layout:** Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

FIGUR
32 Menikmati Hidup
EKONOMI TERKINI
36 Masih Banyak Potensi Peserta Amnesti Pajak
KOLOM EKONOM
40 Tantangan Pembangunan Provinsi Termuda
GENERASI EMAS
44 Studi Bahagia di Finlandia
OPINI
46 Kenapa Repot Menerbitkan Sukuk?
REGULASI
48 Cukai Tembakau sebagai Pengendali Konsumsi Rokok
INSPIRASI
50 Sebuah Asa di Balik Chiffon Jogja
RENUNGAN
52 Asupan dan Kualitas Diri
FILM
53 SNOWDEN: Sang Jenius Yang ‘Berkhianat’
JALAN-JALAN
54 Toraja Inang Mellong, Toraja Memang Keren
SELEBRITI
56 Akhir Perjalanan Supernova

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel dibidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh di Google play dan App store.



2nd INTERNATIONAL FORUM ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND PUBLIC POLICY

Unlocking Public And Private Investment:
Role Of Financial Sector

Bali, 8 - 9 December 2016

Supported by:



In coordination with:



Dari Lapangan Banteng

Menuju APBN yang Kredibel

Sebulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 ditetapkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan evaluasi. Jika direview, realisasi penerimaan negara pada tahun 2014 dan 2015 selalu jauh di bawah target APBN. Untuk tahun 2016, pencapaian penerimaan perpajakan semester I juga tidak dapat setinggi yang diharapkan. Hal ini kemudian membuat Menkeu menghitung ulang kembali target outlook perpajakan. Hasil perhitungannya sebesar Rp216 triliun, lebih rendah dari perkiraan di APBN Perubahan 2016. Namun, perhitungan ini dianggap lebih realistis.

Setelah terjadi penyesuaian di sisi penerimaan, maka target belanja juga harus diturunkan. Untuk menjaga defisit fiskal, hal ini wajar dilakukan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit kita tidak boleh melebihi tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Efisiensi belanja pemerintah pusat dilakukan dengan pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Sedangkan untuk daerah dilakukan dengan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) di beberapa daerah. Tujuannya agar APBN menjadi kredibel.

Untuk kebijakan fiskal di tahun 2017, fokusnya masih tetap sama, yaitu membangun perekonomian secara lebih kuat di tengah perekonomian global yang masih lemah. Selain itu, pemerintah berusaha membuat 40 persen masyarakat paling bawah mendapatkan keuntungan yang besar dari APBN. Maka, pada tahun 2017 akan dilakukan *piloting project* pemberian subsidi pangan dalam bentuk transfer (nontunai). Subsidi ini

akan dilaksanakan di 44 Kabupaten/Kota. Tentunya hal ini membuat pemberian subsidi lebih tepat sasaran. Selain itu, masyarakat tersebut juga akan lebih mengenal perbankan. Intinya, pemerintah berusaha mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif.

Pelaksanaan APBN 2016 tinggal hitungan bulan. Pemerintah berharap, pada akhir tahun 2016 seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dapat melakukan kegiatan yang tetap berfokus pada bagaimana menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk APBN 2017 mendatang, pemerintah berharap setiap K/L bersiap untuk prioritas tahun depan sehingga penyerapan anggaran tidak mundur. APBN yang realistis, kredibel, dan efisien membuat program pemerintah dapat berjalan sesuai rencana.

**Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
@KemenkeuRI**

#TahukahKamu RAPBN 2017 dirancang untuk lebih realistis, kredibel, efisien. Apa harapan kamu terhadap pelaksanaan RAPBN 2017?

**angga kurniawan
@kurniawanakak**
Harapannya adl ketika pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan bisa merata dan bisa dirasakan oleh sekitar 200jt rakyat Indonesia. Dan pembangunan

infrastruktur tdk hanya berfokus di Jawa saja (atau bahkan hanya ibukota) tp jg menyasar daerah kecil. #OpiniAnda #SadarAPBN

**Apritama Nur
@apri_enha**
menurunkan angka kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, efisiensi ekonomi #SadarAPBN

**Fasikha
@ipas_fasikha**
Slain infrastruktur jg utamkn pmbgunn mnusianya krn SDM yg unggul mrpkn upaya bsr investasi jgka pjg bgsa Indonesia. #OpiniAnda

tweet



www.kemenkeu.go.id



[Kementerian Keuangan RI](#)



[@KemenkeuRI](#)



[Kemenkeu RI](#)



[kemenkeuri](#)

Jambore Perbendaharaan

Enam ratus pegawai dari 15 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah mengikuti Jambore Perbendaharaan dan Latihan Bela Negara beberapa waktu lalu.

Beragam kegiatan dilakukan, seperti baris-berbaris, wawasan kebangsaan, pengenalan alat utama sistem pertahanan, pendakian Gunung Tidar, dan capacity building. Bertempat di Akademi Militer, Magelang, tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan rasa cinta tanah air, jiwa korsa, dan loyalitas serta membentuk insan perbendaharaan yang disiplin.

Foto
Ginanjar Rah
Widodo



Aksi Sang Joki Pacu Jawi

Foto
Prasasta Adi
Putra

Tradisi Pacu Jawi (jawi dalam bahasa Minang berarti sapi) telah ada sejak ratusan tahun lalu di Tanah Datar, Sumatera Barat. Berbagai aksi para joki memacu jawi menjadi atraksi dengan daya tarik tersendiri. Sang joki bahkan tak ragu menggigit ekor sapi pacuannya agar semakin kencang berlari.



Pemerintah Luncurkan Obligasi Negara Ritel ORI013

29/10

Teks Biro KLI
Foto DJPPR

Pemerintah secara resmi meluncurkan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI013. Peluncuran dilakukan secara langsung oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta. Masa penawaran ORI013 pada 29 September 2016 hingga 20 Oktober 2016. Dengan tenor tiga tahun, ORI013 akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2019. Minimum pemesanan sebesar Rp5 juta dan kelipatannya, dengan maksimum pemesanan Rp3 miliar. Dengan status dapat diperdagangkan di pasar sekunder (tradable), minimum holding period obligasi ini adalah dua kali pembayaran kupon. ORI013 sendiri menawarkan kupon tetap (fixed rate) sebesar 6,60 persen per tahun, yang pembayaran kuponnya akan dilakukan setiap bulan.



KPPBC TBK Tegah 2 Kasus Penyelundupan Narkotika dan Psikotropika

KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun (TBK) berhasil menegah dua kasus penyelundupan psikotropika dan narkotika di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun. Penegahan ini terjadi pada 26 September 2016, dimana petugas dari Customs Narcotics Team berhasil menggagalkan upaya pemasukan 131,29 gram Methamphetamine (sabu-sabu) dan 1,32 gram Narkotika Golongan I berupa Diamorfin (Heroin).

29/10

Teks DJBC
Foto DJBC

06/10

Teks DJBC
Foto DJBC

KPPBC Sintete Hibahkan Belasan Ton Sayuran Selundupan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menghibahkan belasan ton sayuran yang diselundupkan oleh para pelintas batas dari Malaysia pada Kamis (29/09). Penegahan tersebut sendiri merupakan kerja sama antara aparat Korem Sintang 121 ABW di Ledo dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete. “14 ton sayuran berupa bawang merah, kentang dan wortel telah dihibahkan ke panti asuhan, pesantren dan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sambas melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sambas,” jelas Kepala KPPBC Sintete Aris Sudarminto.



30/09

Teks DJBC
Foto DJBC

Menkeu Umumkan Kebijakan Cukai 2017

Menteri Keuangan umumkan kebijakan cukai 2017 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Jakarta pada Jumat (30/09). Dalam kebijakan Cukai 2017, pemerintah menaikkan tarif cukai dengan kisaran antara 0 hingga 13,46 persen. Kenaikan tarif cukai tertinggi sebesar 13,46 persen berlaku untuk hasil tembakau Sigaret Putih Mesin (SPM). Sementara, kenaikan terendah tarif cukai sebesar 0 persen (tetap), berlaku untuk hasil Tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan IIIB.



Kemenkeu Raih Best Sukuk Deal of The Year 2016

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerima penghargaan sebagai Best Sukuk Deal of the Year 2016 dari Global Islamic Finance Awards (GIFA) yang berkedudukan di London, Inggris. Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan di Hotel Fairmont, Jakarta pada Kamis (29/09).

29/09

Teks Biro KLI
Foto DJPPR

15-17/11

Menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA). Lokasi dipusatkan di Gd Dhanapala&disamping TMII. Kegiatan akan dibuka Wamenkeu dan dihadiri Praktisi Manajemen Keuangan Publik dari 13 negara Asia.

07-11/11

Rapimnas Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 dengan tema “Kerja Nyata, Memantapkan Fungsi Treasury Dalam Menjaga Akuntabilitas dan Kredibilitas Keuangan Negara” di Gdg. Dhanapala.

04/11

Konferensi AAIPI.

28-30/11

Workshop Tunas Integritas K/L bersama dengan KPK.

02-04/11

Rakernas DJKN (dihadiri oleh Menteri Keuangan) di Gdg Syafrudin.

15/11

Host 11th AFMIS (ASEAN Finance Minister’s Investor Seminar) di Hotel Mulia Senayan, Jakarta.

15/11

Acara AFMIS di Hotel Mulia.

24/11

Investor Gathering dan PPP Event.

09/11

Seminar Hari Oeang dengan pembicara Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bapak Boediono, dan Bapak Chatib Basri.

13/11

Pameran Ikanas.

17-19/11

Pameran Anugrah Media Humas.



Wamenkeu Apresiasi IAI atas Terbitnya PSAK 70

06/10

Teks Biro KLI

Foto Biro KLI

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menyambut baik langkah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 70: Aku nanti, Asset, dan Liabilitas Pengampunan Pajak dalam acara Sosialisasi PSAK 70 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (06/10). PSAK tersebut, menurutnya, merupakan panduan bagi entitas dalam menyusun laporan keuangannya setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. PSAK tersebut memberikan opsi kepada wajib pajak yang ingin memanfaatkan program Amnesti Pajak maupun yang tidak. Ia berharap, tidak ada lagi keraguan Wajib Pajak yang akan mengikuti Amnesti Pajak dan mendeklarasikan hartanya yang selama ini belum dilaporkan.

06/10

Teks Biro KLI

Foto Biro KLI

Peringatan Hari Bea Cukai Indonesia

Untuk memperingati Hari Bea Cukai, Menteri Keuangan (Menkeu) mengikuti upacara di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Jakarta pada Kamis (13/10). Dalam sambutannya, ia mengapresiasi seluruh pegawai DJBC yang telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. “Jaga diri Anda dan jaga institusi dengan kejujuran, ketegaran, dengan sepenuh hati,” kata Menkeu. Sebagai informasi, Hari Bea Cukai Indonesia ditetapkan pada 1 Oktober.



Anggaran Realistis Membuat Pasar Optimis

Pembahasan Rancangan APBN 2017 memasuki masa-masa akhir. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada postur APBN tahun depan dengan sebelumnya. Pemerintah mengajukan postur pendapatan dan belanja yang lebih realistis. Tujuannya, dengan perencanaan anggaran sesuai kemampuan, target pembangunan di dalam APBN bisa dipenuhi sekaligus membangkitkan optimisme pelaku pasar.

Dalam postur APBN 2017, asumsi pertumbuhan ekonomi disusun pada angka 5,1 persen. Berikutnya, tingkat inflasi pada angka 4 persen, tingkat rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,3 persen, dan asumsi nilai tukar rupiah disepakati sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan Media Keuangan di Jakarta, pertengahan bulan ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan agar Kementerian/Lembaga (K/L) dapat mempersiapkan prioritas

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rapat pembahasan postur APBN 2017 dengan Badan Anggaran di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (29/9).

Foto
Anas Nur Huda



19/10

Teks Biro KLI

Foto Biro KLI

Wisuda PKN STAN

Sebanyak 3.208 lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) mengikuti prosesi wisuda pada Rabu (19/10) di Sentul Internasional Convention Centre. Menteri Keuangan (Menkeu) dan beberapa pejabat eselon I turut hadir pada acara ini. Dalam sambutannya, Menkeu menyampaikan harapannya agar para lulusan PKN STAN dapat mengabdikan dirinya kepada negara. “Jangan mengkhianati Republik Indonesia, karena para lulusan tersebut mendapat hak istimewa untuk mendapat pekerjaan,” kata Menkeu.

anggaran yang akan diimplementasikan pada 2017. “Terutama bagaimana menyiapkan prioritas anggaran, sehingga penyerapan tidak mundur,” kata Menkeu. Prioritas yang dimaksud Menkeu terutama pada program-program pembangunan infrastruktur, perlindungan masyarakat miskin, pengurangan kesenjangan, dan penciptaan lapangan kerja. “Ini dapat menimbulkan suasana nyaman dan percaya diri dalam kita menggerakkan perekonomian,” ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan postur APBN 2017 yang realistis tercermin dalam desain penerimaan dan belanja, termasuk bagaimana jika anggaran keduanya tidak seimbang. “Bagaimana kalau posturnya surplus atau defisit, termasuk bagaimana pembiayaannya jika postur defisit,” kata Menkeu. Dalam pembahasan-pembahasan di DPR, lanjut Menkeu, pemerintah telah mengomunikasikan hal ini dengan para anggota dewan. “Kita melakukan proses politik yang sehat,” ujarnya lagi.

Pada implementasi APBNP 2016 yang sedang berjalan, Menkeu berharap seluruh K/L tetap dapat memberikan fokus pada program yang turut menjaga momentum ekonomi. “Belanja untuk infrastruktur mungkin mengalami sedikit perlambatan, tapi tidak dipotong,” tutur Menkeu. Oleh karena itu, Menkeu berharap para menteri mampu mengawal penyesuaian anggaran tersebut tanpa mengurangi momentum ekonomi.

Disinggung tentang peluncuran paket-paket kebijakan sebagaimana dilakukan pada 2015 dan 2016 yang cukup menopang kinerja perekonomian, Menkeu mengatakan masih akan melakukan kajian. Jika ingin membuat perekonomian kompetitif dan memperbaiki produktivitas, kata Menkeu, maka pemerintah perlu selalu memikirkan kebijakan yang dapat mewujudkan hal tersebut. “Selama ini pemerintah membuat paket kebijakan karena hal tersebut memudahkan kami berkomunikasi dengan pelaku usaha dan menciptakan rasa percaya diri,” ujar Menkeu.

Selain asumsi ekonomi makro, pemerintah dan DPR telah menyetujui usulan pagu anggaran

2017, termasuk untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pagu yang disepakati sebesar Rp40,77 triliun. Persetujuan diperoleh dari Rapat Kerja Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR pada Selasa (18/10) di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta. Pagu tersebut Rp1,4 triliun lebih rendah dari usulan semula, Rp42,17 triliun.

Menkeu mengungkapkan penyesuaian tersebut berasal dari berbagai penghematan, baik belanja barang maupun belanja modal. Kemenkeu menjadi contoh kementerian yang berupaya menerapkan kebijakan efisiensi dan efektivitas anggaran. Dari belanja barang, penghematan dilakukan untuk belanja perjalanan dinas, honorarium dan belanja pemeliharaan. Dari sisi belanja modal, penghematan dilakukan untuk pembangunan/renovasi gedung bangunan negara serta pengadaan kendaraan dinas. “Penyesuaian pagu anggaran ini sudah dibahas di Panitia Kerja (Panja) Banggar. Kami coba ketatkan anggaran, melakukan efisiensi di Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi yang penting,” kata Menkeu.

Menjaga kredibilitas fiskal

Ditemui dalam kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Anggaran Askolani mengungkapkan bahwa pemerintah selalu mengevaluasi kebijakan yang diterapkan setelah APBN dan APBNP dijalankan. Dari evaluasi APBNP 2016, salah satu yang paling menjadi sorotan adalah target

pendapatan, utamanya pajak. “Kita melihat sampai semester I, tampaknya target penerimaan pajak tidak dapat setinggi yang diharapkan. Ini harus disikapi,” ujar Askolani.

Prediksi tersebut didapatkan setelah Menkeu secara langsung melakukan konfirmasi dengan seluruh kepala Kantor Wilayah Pajak. Koreksi outlook penerimaan pajak dalam APBNP 2016 mencapai sekitar Rp200 triliun. Setelah pemerintah menghitung koreksi terhadap potensi penerimaan pajak, Askolani menjelaskan bahwa dampaknya menyentuh postur APBN secara keseluruhan.

Pada postur rancangan APBN 2017, pemerintah pun melakukan revisi belanja negara, sejalan dengan penyesuaian target penerimaan. “Ini untuk menjaga kredibilitas fiskal, termasuk karena defisit tidak bisa melampaui tiga persen dari PDB (Produk Domestik Bruto),” kata Askolani. Dalam wawancara di kantornya di Jakarta belum lama ini, dia juga menyampaikan pesan kunci rancangan APBN 2017 yang diajukan pemerintah.

Pertama, APBN 2017 disiapkan dengan pijakan yang lebih realistis, salah satunya dengan melihat basis *outlook* realisasi APBNP 2016. *Kedua*, APBN 2017 tetap mempunyai banyak program pembangunan, mulai dari pengerjaan proyek-proyek infrastruktur, program perlindungan sosial, dan juga program-program yang memacu dunia usaha. “Di samping itu

tentunya, pemerintah tetap memberikan dukungan untuk dunia usaha dengan memberikan insentif dan paket-paket kebijakan,” ujar Askolani.

Meningkatkan permintaan

Menteri Keuangan Periode 2013-2014 Chatib Basri menilai penyesuaian postur pendapatan dan belanja pada rancangan APBN 2017 adalah tindakan yang tepat. Menurut Chatib, saat ini perekonomian global berada pada era yang berbeda dibandingkan dengan periode sebelumnya. “Minggu lalu, saya baru saja kembali dari Harvard University dan bertemu dengan para ekonom di sana. Mereka juga mengatakan bahwa negara-negara *emerging market* akan masuk dalam periode *growth* yang lebih rendah,” kata dia.

Dalam kondisi seperti sekarang, Chatib mendukung penyusunan postur APBN yang realistis. “Kalau pertumbuhan ekonomi hanya lima persen dan juga harga komoditas di pasar global turun pasti berpengaruh pada penerimaan pajak,” ujar Chatib. Dengan penyesuaian target penerimaan, maka alokasi belanja mesti benar-benar difokuskan pada jenis yang berkualitas.

Dari kondisi internal, Chatib menilai pemerintah perlu berfokus pada upaya-upaya peningkatan permintaan (*demand*) untuk mendukung pelaksanaan APBN 2017. Menurut Chatib, konsumsi dalam negeri, terutama konsumsi rumah tangga masih menyumbang

PDB hingga 60 persen. “Sayangnya, pendapatan orang Indonesia banyak yang terkait dengan harga komoditas. Kalau *income* turun, belanjanya juga akan turun dan daya belinya menjadi berkurang,” ujar Chatib.

Di sisi lain, jika permintaan lambat, pelaku usaha akan berpikir panjang untuk melakukan ekspansi usaha. “Jadi upaya pemerintah meningkatkan daya beli ini penting. Pelaku bisnis kemudian akan melihat ada kesempatan untuk meningkatkan usaha. Intinya adalah bagaimana mendorong permintaan,” kata Chatib. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong permintaan misalnya dengan membuat program padat karya seperti pembersihan selokan dan perbaikan jalan desa. “Ini program yang bisa dilakukan dalam periode pendek,” ujar Chatib menambahkan.

Chatib berharap anggota DPR dapat memahami rencana pemerintah mengajukan postur yang realistis. “Kita *kan* tidak mau mempunyai APBN yang di tengah jalan tidak bisa dilaksanakan. Lebih repot jika program sudah disiapkan dan tender dimulai, lalu tidak bisa dijalankan,” katanya. Menurut Chatib, justru lebih baik membuat postur yang realistis. Sewaktu-waktu terdapat ekstra pendapatan, maka bisa dimanfaatkan sebagai *windfall*. “Saya melihat cara berpikir yang digunakan sebaiknya adalah *hope for the best, but prepare for the worst*. Lebih baik *under promise over deliver*,” ujar Chatib lagi. Dengan penyusunan

postur yang realistis, APBN akan dipandang menunjukkan kredibilitas fiskal. Dampaknya, pasar dapat melihat bahwa pemerintah mengerti persoalan pengelolaan keuangan negara.

Upaya terobosan

Senada dengan Chatib, Direktur Utama INDEF, Enny Sri Hartati menilai upaya pemerintah mengajukan postur APBN 2017 yang realistis sebagai langkah tepat. Kebijakan ini bisa membangkitkan kepercayaan masyarakat. “Kalau anggaran realistis, perencanaan program nantinya bisa *on the right track*,” kata Enny dalam wawancara dengan Media Keuangan di kantornya di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Enny tidak memandang kenaikan atau penurunan pendapatan dan belanja sebagai sebuah hal yang patut dipersoalkan. Yang lebih utama adalah program terobosan yang diluncurkan pemerintah, seperti amnesti pajak yang cukup berhasil pada tahun ini. “Setelah ada deklarasi dalam negeri dalam jumlah besar, seharusnya ada perluasan basis pajak pada 2017,” kata Enny. Pada tahun depan, Enny berharap pemerintah dapat meneruskan program terobosan ini, misalnya dengan memperbaiki sistem administrasi perpajakan dan mengevaluasi pengananaan beberapa jenis tarif pajak.

Upaya terobosan lain yang dapat dijalankan adalah dengan melaksanakan program prioritas dengan baik. Enny menilai pemerintah sebaiknya fokus pada belanja yang mendorong penambahan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan. “Misalnya, kalau fokus ke industri, maka ditentukan saja industri apa yang paling efieisn dan mampu menyelenggarakan lapangan kerja paling efisien,” kata Enny.

Dalam pembahasan akhir dengan DPR, Enny yakin pemerintah mampu meyakinkan DPR dengan postur yang realistis. “Kemampuan untuk meyakinkan anggota dewan harus didukung dengan perencanaan program dan pertimbangan-pertimbangan pengajuannya yang obyektif,” ujar Enny. Di luar itu, Enny berharap proses pengesahan APBN 2017 bisa dilakukan dengan mengakomodasi pertimbangan politik dan pertimbangan teknokratis secara seimbang agar kredibilitasnya terjamin.

MERASIONALISASI TARGET APBN

Perekonomian Indonesia masih diwarnai beragam tantangan dari dalam dan luar negeri. Untuk itu, pemerintah merancang APBN 2017 yang lebih realistis, kredibel, dan efisien. Penerimaan negara ditarget lebih rasional, mempertimbangkan kondisi dan prospek ekonomi Indonesia ke depan. Sisi belanja ditekan melalui

pemotongan anggaran yang dinilai kurang efektif dan efisien dengan tetap berfokus pada belanja prioritas. Melalui APBN yang lebih rasional, perekonomian Indonesia bisa lebih optimal. Kebijakan yang lebih realistis, diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga berdampak positif bagi geliat ekonomi.

SASARAN PEMBANGUNAN RAPBN 2017

PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR

815KM

Ruas Jalan

55LOKASI

Fasilitas Pelabuhan Laut

550KM

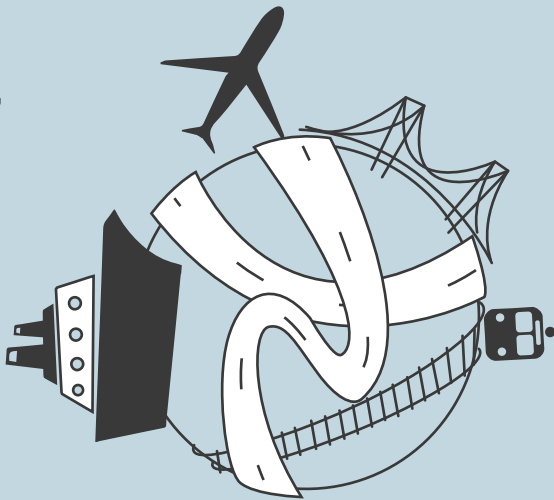
Jalur kereta api (tahap pertama dan tahap penyelesaian)

9.399M

Jembatan

14LOKASI

Bandara Baru



KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI PRODUKSI

77JUTA TON

Produksi Padi

144.613HA

Areal Pertanian

9,41JUTA TON

Perikanan Budidaya

22,4JUTA TON

Produksi Jagung

6,67JUTA TON

Perikanan Tangkap

3,2JUTA TON

Produksi Garam

92,75%

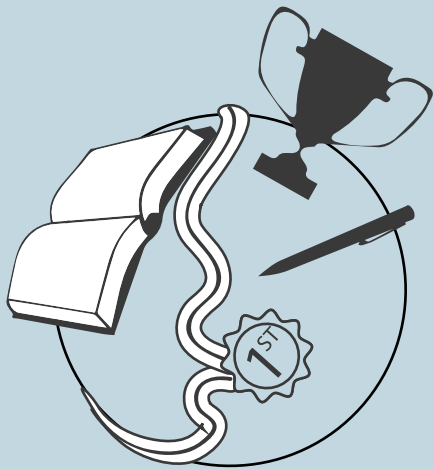
Rasio Elektrifikasi

64.200

Sambungan rumah tangga untuk jaringan gas bumi

128 UNIT

Pembangkit listrik dari aneka energi terbarukan (EBT)



PENDIDIKAN

101,1RIBU

Sertifikasi guru

10,2RIBU

Sertifikasi dosen

8,5JUTA

Siswa untuk Bantuan Operasional Sekolah

19,5JUTA

Siswa penerima Kartu Indonesia Pintar

360,5RIBU

Mahasiswa penerima Bantuan Bidikmisi

107PTN

Untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri



PERLINDUNGAN SOSIAL

6JUTA

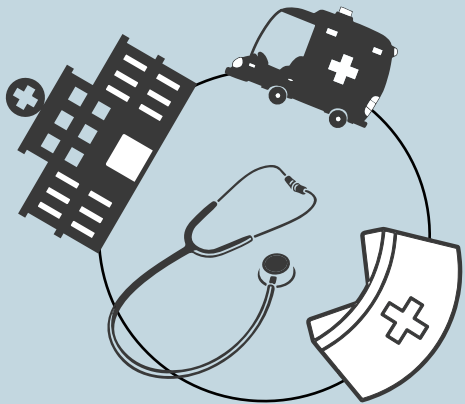
Rumah tangga sasaran (RTS) penerima bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH)

44KOTA BESAR

Dengan target 1,2 juta RTS PM penerima bantuan pangan sebagai hasil pengalihan sebagian subsidi rastra dengan mekanisme nontunai/voucher

14,3JUTA

Rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM) penerima subsidi pangan (rastra)



KESEHATAN

92 %

Imunisasi dasar lengkap untuk anak usia 0-11 bulan

94,4JUTA JIWA

Peserta Penerima Bantuan Iuran (PIB) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)

700

Kecamatan dengan puskesmas terakreditasi

6,97JUTA JIWA

peserta KB baru

APBNP 2016 & RAPBN 2017

	APBNP 2016	RAPBN 2017
PENDAPATAN NEGARA	1.786.225,0	1.737.629,4
PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.784.249,9	1.736.256,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.539.166,2	1.495.893,8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	245.083,6	240.362,9
II. PENERIMAAN HIBAH	1.975,2	1.372,7
BELANJA NEGARA	2.082.948,9	2.070.465,9
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.306.696,0	1.310.439,3
1. Belanja K/L	767.809,9	758.378,0
2. Belanja Non K/L	538.886,1	552.061,3
TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA	776.252,9	760.026,7
KESEIMBANGAN PRIMER	(105.505,6)	(111.431,4)
SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN	(296.723,9)	(332.836,6)
% Surplus/ (Defisit)	(2,35)	(2,41)
PEMBIAYAAN ANGGARAN	296.723,9	332.836,6
I. PEMBIAY AAN UTANG	371.562,6	389.009,3
II. PEMBIAY AAN INVESTASI	(93.984,8)	(49.138,9)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	461,7	(6.409,7)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(651,7)	(924,1)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	19.336,1	300,0

Tahun Konsolidasi Fiskal

Pembangunan gedung bertingkat di Jakarta.

Foto
Anas Nur Huda



Sejak dilantiknya Presiden Joko Widodo 2015 lalu, perekonomian Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Diawali perubahan paradigma keuangan negara, antara lain mengalihkan belanja konsumtif menjadi belanja lebih produktif melalui reformasi terhadap subsidi energi dan belanja negara. Lalu di tahun berikutnya pemerintah melanjutkan dengan upaya percepatan penyerapan optimalisasi anggaran.

Kini, ditengah lemahnya ekonomi dan perdagangan dunia, pemerintah kembali berbenah dengan menetapkan 2017 sebagai tahun konsolidasi fiskal. Di bidang pendapatan, pemerintah memperbaiki perhitungan basis penerimaan perpajakan yang sejalan dengan realisasi penerimaan perpajakan di tahun 2016 agar lebih rasional.

Di bidang belanja, pemerintah fokus pada belanja prioritas serta melakukan efisiensi pada belanja operasional nonprioritas. Sementara di bidang pembiayaan anggaran, pemerintah melakukan penghematan pada investasi dengan mencari sumber pendanaan yang murah. Dengan demikian, pemerintah merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 lebih realistis, efisien, dan kredibel.

Prinsip realistis dalam postur RAPBN 2017 mencerminkan kondisi yang lebih rasional dalam menetapkan target pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan sehingga program strategis berjalan sesuai rencana. Sementara postur RAPBN yang efisien dimaksudkan agar alokasi anggaran sesuai kebutuhan prioritas pembangunan yang hemat, tidak berlebihan, serta tepat sasaran.

Menurut Rofianto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, postur anggaran yang realistis dan efisien ini nantinya akan dapat memberi kepastian dan menciptakan kepercayaan publik. “RAPBN 2017 selaras dengan kondisi yang *real*. Artinya, masyarakat, dunia usaha, pengusaha, maupun investor percaya pada APBN. Mereka yakin APBN dapat dijalankan (dengan baik) sehingga otomatis mereka bisa merencanakan investasi, berbisnis, maupun perluasan usaha,” tuturnya.

Dengan meningkatnya kepercayaan publik, maka dapat mendorong arus investasi dari dalam maupun

luar negeri untuk masuk ke tanah air. Bila investasi bertambah, kata Rofi, maka bisa berkontribusi positif mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperluas pembangunan, serta menciptakan pemerataan.

Secara garis besar, fokus utama pada RAPBN 2017, yaitu mengoptimalkan pendapatan negara terutama perpajakan dengan menjaga iklim investasi dan dunia usaha serta melanjutkan reformasi bidang perpajakan. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2017 disebutkan, potensi penerimaan perpajakan diperkirakan tumbuh 13-15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan pendapatan ini juga didukung optimalisasi pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Kedua, meningkatkan kualitas belanja produktif dan prioritas dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pemerintah juga berupaya untuk melakukan penghematan anggaran untuk belanja nonprioritas dan nonproduktif serta mengendalikan alokasi subsidi yang tepat sasaran.

Ketiga, melakukan penghematan pada pembiayaan investasi dengan fokus pada kemandirian BUMN dan infrastruktur dengan mencari sumber pembiayaan yang murah. Dalam hal ini, pemerintah mendorong BUMN dan Investor swasta ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastuktur dengan

skema kerja sama yang saling menguntungkan.

Pendapatan Negara

Dalam RAPBN 2017, pendapatan negara ditargetkan sebesar mencapai Rp1.737,62 triliun atau 2,7 persen lebih rendah dibanding APBN Perubahan 2016 sebesar Rp1.786,22 triliun. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.495,89 triliun, PNBP ditetapkan sebesar Rp240,36 triliun, dan hibah sebesar Rp1,37 triliun.

Berdasarkan data dari Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP, untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 telah disiapkan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Upaya ini dilakukan dengan penggalian potensi pajak berbasis sektoral nasional dan regional, penguatan basis data, serta penyempurnaan peraturan perpajakan. Pemerintah juga melakukan implementasi aplikasi faktur pajak elektronik, *cash receipt system*, dan konfirmasi status wajib pajak. Disisi pengawasan, mengoptimalkan pengawasan wajib pajak, pengusaha kena pajak termasuk pengawasan di kawasan berikat dan kawasan bebas.

Kebijakan lain untuk meningkatkan penerimaan pajak, yaitu kemudahan melakukan pembayaran, pelaporan, dan akses informasi, serta penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan efektivitas

pemeriksaan dan penagihan, menegakkan hukum perpajakan, dan melanjutkan program Amnesti Pajak 2016.

Data dari Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, DJBC menyebutkan bahwa peningkatan penerimaan perpajakan sektor kepabeanan dan cukai juga dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk intensifikasi, pemerintah meningkatkan kualitas pemeriksaan barang dan dokumen kepabeanan, meningkatkan *targeting audit* dan jumlah objek *joint audit*, meningkatkan *customs advice* serta memperkuat penggunaan teknologi informasi. Sementara untuk ekstensifikasi, pemerintah melakukan penutupan pelabuhan ‘tikus’, meningkatkan sarana prasarana operasi laut, serta menetapkan pengenaan bea masuk untuk ekspor produk mentah (CPO, kayu, kulit, kakao).

Untuk mendorong investasi, pemerintah tetap konsisten dalam menurunkan *dwelling time*, serta membentuk Pusat Logistik Berikat di seluruh Indonesia. Pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan atau penangguhan untuk Kawasan Berikat, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Pusat Logistik Berikat. Di bidang lainnya, pemerintah mengoptimalkan penerapan *Indonesia National Single Window* serta membentuk *Indonesia Single Risk Management*.

Belanja

Besaran anggaran belanja negara pada RAPBN 2017 dialokasikan sebesar Rp2.070,47 triliun, 0,6 persen lebih rendah dibanding APBN Perubahan 2016 sebesar Rp2.082,95 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.310,44 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp760,03 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp758,38 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp552,06 triliun. Sementara belanja transfer ke daerah dan dana desa terdiri atas belanja transfer ke daerah sebesar Rp700,03 triliun serta dana desa sebesar Rp60 triliun.

Rofianto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF mengatakan, bila sebelumnya pemerintah menyusun anggaran berdasarkan prinsip *money follow function*, maka saat ini berubah menjadi *money follow program*. “Jadi prinsipnya, sebelum uang dibagi untuk Kementerian/Lembaga, maka *money follow program* akan fokus pada program prioritas,

program strategis. Proyek ini akan memberikan *multiplayer effect* bagi perekonomian. Mengefisienkan ekonomi, meningkatkan daya saing,” katanya.

Terkait anggaran transfer ke daerah dan dana desa pada RAPBN 2017 secara umum kebijakan yang akan diambil, yaitu: 1) mengkonsolidasikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sejalan dengan anggaran K/L; 2) memperbaiki alokasi dan mengoptimalkan penggunaan dana transfer umum; 3) memperbaiki pengalokasian dana transfer khusus untuk percepatan peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional; 4) mengalokasikan anggaran dana insentif daerah untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik; 5) melakukan efisiensi dan efektivitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat, dan Provinsi Aceh, serta Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; serta 6) mengalokasikan Dana Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembiayaan

Dengan besaran pendapatan dan belanja tersebut, RAPBN 2017 mengalami defisit anggaran sebesar Rp332,84 triliun atau 2,41 persen terhadap PDB. Target ini lebih tinggi dibandingkan defisit pada APBN Perubahan 2016 sebesar Rp296,72 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB. Ini berarti pemerintah menempuh kebijakan fiskal ekspansif yang sejalan dengan upaya pembangunan nasional.

Meskipun demikian, Scenaider Siahaan, Direktur Strategi dan

Portofolio Pembiayaan DJPPR menjelaskan bahwa Penerapan kebijakan tersebut tetap diikuti dengan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. “Pemerintah akan mengendalikan defisit dalam batas aman (di bawah 3 persen), mengendalikan rasio utang melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang yang *manageable*, mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dan mengendalikan keseimbangan primer melalui *fiscal vulnerability*,” ungkapnya.

Terkait pembiayaan utang, Scenaider menekankan bahwa pemerintah akan memprioritaskan penerbitan SBN dalam mata uang rupiah. Disamping itu, Pemerintah juga akan mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka *Asset Liabilities Management* (ALM), serta mendukung pelaksanaan program-program strategis Pemerintah.

Terkait kerja sama pemerintah dan sektor swasta, sejumlah BUMN telah ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur, seperti: a) PT PLN (Persero) untuk pembangunan pembangkit listrik dan transmisi (program 10.000 MW tahap I dan tahap II, serta program 35.000 MW); b) PT Utama Karya (Persero) untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera; c) PT Adhi Karya (Persero) untuk pembangunan LRT Jabodebek; d) PT Waskita Karya (Persero) untuk pembangunan LRT Palembang-Sumatera Selatan; e) PT KAI (Pesero) untuk penyediaan sarana operasi LRT.

Teks lin Kurniati

Laporan Utama

Murid Sekolah Dasar.

Foto Adhi Kurniawan

Belanja Tepat Tingkatkan Manfaat

Belanja negara merupakan hal utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebab itu, pemerintahan akan memastikan komposisi dan alokasi belanja memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya warga negara.

Prioritas Belanja Dalam APBN 2017

Askolani, Direktur Jenderal Anggaran mengatakan tahun depan pemerintah menitikberatkan pada belanja modal. Hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden untuk mendukung infrastruktur terutama sektor konektivitas, energi, dan pertanian. Semuanya dengan memperhitungkan manfaat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. “Harapan kita, infrastruktur yang memadai bisa memberikan efek yang cepat. Dengan adanya jalan atau jembatan misalnya, pembangunan akan lebih berkelanjutan dibanding belanja barang yang langsung habis,” jelas Askolani.

Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Apindo menyarankan, dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah sebaiknya berkonsentrasi pada kawasan Indonesia timur dan daerah pinggiran. Sementara, untuk infrastruktur yang bersifat komersil, lebih tepat bila diserahkan kepada pihak swasta. “Pemerintah harus pintar memilah. *Ngapain* uang APBN dimasukkan ke tempat yang layak diinvestasikan oleh swasta?” ujar Hariyadi.

Menurut Hariyadi, minat swasta untuk berinvestasi pada sektor infrastruktur sebenarnya besar, contohnya pada proyek listrik 35ribu MW. Hanya saja, masih perlu perbaikan regulasi dan kapabilitas penanggungjawab proyek. “Jangan sampai investor kecewa. Kalau peran swasta maksimal, beban negara menjadi tidak terlalu berat *kan*,” ungkapny.

Kunta Wibawa, Direktur Penyusunan APBN mengatakan, tantangan yang di munculkan dari sisi belanja pemerintah adalah melakukan efisiensi. Pemotongan belanja K/L yang dilakukan sejak APBNP 2016 memang dialihkan untuk memperkuat belanja infrastruktur. “*Duit* yang ada harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan *output* yang sebesar-besarnya,” ujar Kunta. Untuk belanja barang, ada beberapa pos yang dinilai perlu dibatasi seperti belanja rapat dan

belanja gedung serta kendaraan. “Kita awasi agar belanja-belanja ini secukupnya saja. Rapat, perjalanan dinas, dan konsinyering harus dikendalikan agar efisien,” lanjutnya.

Belanja negara juga digunakan untuk memperkuat program prioritas yang sifatnya wajib (*mandatory spending*) yakni bidang pendidikan sebesar 20 persen dan bidang kesehatan sebesar 5 persen. Tujuannya adalah untuk memenuhi hak setiap warga negara akan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan layanan umum.

Ada empat prioritas di bidang kesehatan yakni penyediaan imunisasi dasar untuk anak di bawah satu tahun, pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, penyediaan Puskesmas terakreditasi pada tingkat kecamatan, serta peningkatan mutu dan layanan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat untuk rakyat miskin. Sementara alokasi anggaran pendidikan akan diarahkan untuk penyediaan dan pemerataan guru/dosen yang bersertifikasi, bantuan operasional sekolah dan perguruan tinggi, rehabilitasi sarana prasarana pendidikan seperti ruang kelas, serta bantuan pendidikan kepada siswa kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar.

Pengelolaan Subsidi

Disinggung mengenai pengelolaan subsidi, Askolani menyampaikan bahwa secara umum arah subsidi sudah semakin jelas paska penyesuaian subsidi

energi khususnya BBM dan listrik di tahun 2015. “Dulu subsidi kita lebih banyak dinikmati oleh kalangan mampu. Misalnya mereka yang memiliki kendaraan roda empat dan pelanggan listrik di atas 450VA. Sementara mereka yang tidak mampu justru menikmati subsidi paling sedikit, cuma bisa naik kendaraan umum” ujar Askolani.

Untuk subsidi pangan, Askolani memaparkan pemerintah tengah menyiapkan *pilot project* di 44 kabupaten/kota untuk mengubah mekanisme subsidi beras. Sebelumnya, orang miskin bisa membeli beras murah dengan jatah 15kg setiap bulan. Namun kenyataannya, ada yang tidak mampu membeli. Ada pula yang tidak membutuhkan beras sebanyak itu dan kemudian menjualnya kembali sehingga tidak tepat sasaran “Sekarang bantuan tersebut diberikan dalam bentuk nontunai menggunakan *e-money*. “Kita sudah punya data nama dan alamatnya dengan basis survei BPS,” terangny.

Kunta juga menyatakan bahwa ke depannya *e-money* tersebut bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok lain seperti susu atau telur. “Kementerian Sosial tengah menjajaki kerjasama dengan bank-bank agar warung dan minimarket bisa menerima pembayaran dengan uang tersebut. “Nantinya, pada tahun 2019 semua subsidi akan digabung jadi satu kartu agar bisa digunakan sesuai kebutuhan. Dengan begitu, semua alokasinya semua benar-benar tepat sasaran,” tutupnya.

Teks Irma Kesuma

Memperkuat APBN, Menjaga Tulang Punggung Negara



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Foto Agus Tri H.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menjabat pada akhir Juli 2016 dengan membawa langkah besar dalam mewujudkan APBN 2016 yang realistis, efisien, dan kredibel. Begitu pula dengan penyusunan APBN 2017 yang dirancang semakin baik demi mewujudkan prioritas pembangunan nasional. Ditemui pertengahan Oktober lalu, Menteri Keuangan menjelaskan berbagai penyesuaian dalam APBN 2016 dan perencanaan APBN 2017 demi mewujudkan Nawacita yang telah menjadi komitmen pemerintah.

Pemerintah telah melaksanakan langkah strategis dalam APBN 2016, seperti penyesuaian target penerimaan negara, efisiensi belanja, dan penundaan Dana Alokasi Umum di beberapa daerah. Apa yang melatarbelakangi hal tersebut?

Jika kita melihat ke belakang, yaitu tahun 2014 dan 2015, penerimaan negara selalu jauh di bawah target APBN. Tahun 2016, kami bersama-sama Direktorat Jenderal Pajak melihat bahwa melemahnya ekonomi global membuat harga komoditas, ekspor impor, dan pertambangan menurun. Kondisi ini tidak terefleksikan dalam estimasi kita dalam menentukan penerimaan pajak tahun 2016. Setelah dihitung kembali, penerimaan perpajakan akan mengalami kekurangan sebesar Rp219 triliun. Agar APBN kita tetap kredibel, maka kita melakukan penyesuaian di sisi belanja.

Efisiensi pemerintah pusat dilakukan dengan pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 65 triliun. Efisiensi pemerintah daerah melalui kebijakan penundaan DAU di beberapa daerah. Tujuannya apa? Pertama, APBN 2016 kembali pada rel yang kredibel. Setiap pos dari sisi penerimaan bisa dijelaskan hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Kedua, belanja APBN tetap menunjang prioritas pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh pembangunan infrastruktur.

Bagaimana fokus dan arah kebijakan fiskal dalam APBN 2017?

Fokus pemerintah tidak berubah, yaitu bagaimana membangun perekonomian secara lebih kuat di tengah melemahnya perekonomian global. Fokusnya yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, serta memfokuskan belanja kita untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Intinya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif.

Artinya, 40 persen masyarakat paling rendah daya belinya (masyarakat berpenghasilan rendah) bisa mendapat keuntungan besar dari APBN 2017. Kita bisa membuat pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya *growth* cukup tinggi tapi pencapaian kita dalam penciptaan lapangan kerja masih sangat terbatas. Hal itulah yang menjadi landasan desain APBN 2017.

Bisa Anda jelaskan lebih lanjut, bagaimana pemerintah menentukan target penerimaan APBN 2017 yang lebih rendah dari APBNP 2016? Apa alasannya?

Ini dikarenakan kita melakukan penyesuaian setelah melihat pelaksanaan APBN 2016. Mungkin sebaiknya tidak membandingkan APBN 2017 dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 mengenai Perubahan UU APBN 2016. Namun RAPBN 2017 sebaiknya dibandingkan dengan pelaksanaan APBN 2016 yang kita perkirakan penerimaan negara akan mengalami kekurangan sebesar R219 triliun. Dengan melihat hal tersebut, RAPBN 2017 yang kita usulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat masih mengalami pertumbuhan sekitar 13 persen.

Bagaimana kebijakan pengelolaan subsidi dalam APBN 2017? Langkah apa yang dilakukan agar subsidi menjadi lebih tepat sasaran?

Filosofi pemberian subsidi ini yaitu untuk membantu masyarakat dan pelaku ekonomi yang dianggap lemah. Dari sisi efektivitas, kita berkewajiban memperbaiki target penerima subsidi. Oleh karena itu, dalam APBN 2016 kita anggarkan Rp177,9 triliun. Untuk APBN 2017 kita usulkan Rp174 triliun. Targetnya sama, tapi caranya berbeda. Sehingga subsidi benar-benar bisa dinikmati masyarakat miskin dan mengurangi distorsi perekonomian.

Contohnya, selama ini kita selalu memberi pupuk murah kepada petani. Kenyataannya, orang-orang yang tidak berhak bisa membeli pupuk subsidi tersebut dengan harga murah. Di sini terjadi kebocoran

penyaluran subsidi. Sekarang kalau petani sudah didata nama dan luas lahannya, maka mereka bisa diberi kartu khusus penerima subsidi. Pemilik kartu tersebut nantinya akan mendapat potongan harga dan kebijakan ini tidak akan merusak harga pupuk di pasaran.

Ada lagi dimensi yang penting dalam desain penyaluran subsidi tahun depan, yaitu masyarakat akan diberikan bantuan dalam bentuk *transfer* (nontunai). Sebagai negara berkembang, penetrasi inklusi keuangan di Indonesia masih rendah. Kalau dengan subsidi ini bisa mengenalkan masyarakat miskin kepada perbankan, banyak potensi yang bisa dilakukan dan dari sisi akuntabilitas akan jauh lebih baik.

Bagaimana pemerintah meyakinkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa APBN 2017 penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan?

Tentunya kita harus menjelaskan ke DPR bahwa APBN 2017 ini realistis, efisien, dan kredibel. Tiga hal tersebut harus ditunjukkan dari segi desain postur penerimaan, postur belanja, dan bagaimana pembiayaannya kalau terjadi defisit. Kita menyampaikan pada DPR apa yang kita lihat dari sisi perekonomian, apa yang mampu menciptakan penerimaan negara. Berdasarkan itu, kita menyampaikan prioritas pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing Indonesia. Maka prioritas itu terefleksikan dari pos-pos belanja APBN. Kalau tahun depan jumlah belanja lebih banyak dari penerimaan, kita harus menjelaskan ke DPR bagaimana defisit itu akan didanai, melalui sumber-sumber apa saja. Tentunya kita akan mencari sumber pembiayaan yang risikonya paling kecil.

Apa harapan terhadap APBN 2016 yang sedang berjalan dan APBN 2017 yang akan datang?

Untuk APBN 2016, kita berharap pada akhir tahun seluruh K/L masih bisa melakukan kegiatan yang tetap berfokus pada bagaimana menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Untuk APBN 2017, kita berharap para menteri bersiap untuk prioritas tahun depan sehingga penyerapan anggaran tidak mundur. Maka, eksekusi perwujudan prioritas pembangunan bisa dilakukan efisien, tepat waktu, transparan, dan tingkat akuntabilitas yang baik. Hal ini akan menimbulkan rasa percaya, aman, dan nyaman di masyarakat sehingga kegiatan perekonomian bisa berjalan dengan baik.

Teks Pradany Hayyu

Menkeu dalam Pertemuan World Bank-IMF Annual Meetings 2016

Ministeri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri World Bank-IMF Annual Meetings 2016 yang berlangsung pada 4-9 Oktober 2016 di Washington D.C., Amerika Serikat. Kehadiran Menkeu dalam acara tersebut memenuhi kapasitas sebagai Ketua Development Committee, Gubernur Bank Dunia untuk Indonesia, Gubernur Alternatif IMF, serta Menteri Keuangan negara anggota G20.

Pada acara yang dihadiri oleh 25 gubernur (Menteri Keuangan/Menteri Ekonomi) dari 189 negara anggota Bank Dunia dan IMF, Menkeu menjadi salah satu pembicara dalam seminar yang bertema *Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality*. Dalam paparannya, perempuan pertama yang memimpin Development Committee ini menegaskan pentingnya menekan laju ketimpangan antar masyarakat.

Terkait hal ini, Menkeu mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah

Foto
Langgeng W. P.



mengeluarkan kebijakan untuk menekan laju ketimpangan. Pemerintah RI membuat kebijakan fiskal yang mampu mendorong pertumbuhan yang produktif, menciptakan lapangan kerja, menurunkan ketimpangan serta kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga mendorong terciptanya pertumbuhan yang lebih inklusif, misalnya dengan perbaikan target pemberian subsidi, dan alokasi transfer ke daerah yang lebih tinggi termasuk Dana Desa.

Sekembalinya ke tanah air, Menkeu menjelaskan isi pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota G20. Pertemuan itu membahas perkembangan ekonomi global terkini, terutama ketidakpastian ekonomi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2017. “Pertemuan tersebut membahas bagaimana menghadapi risiko pertumbuhan ekonomi dunia, yang disorot lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia,” jelas Menkeu saat konferensi pers di Aula Djuanda Kemenkeu, Rabu (12/10).

Negara-negara G20 juga sepakat untuk memperkuat kerja sama perpajakan internasional, khususnya terkait *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). “Negara-negara anggota G20 maupun secara internasional bersama-sama melakukan upaya mencegah (erosi) basis pajak dari suatu negara. Bagaimana mencegah wajib pajak bisa memindahkan *profit*, sehingga mereka bisa menghindari pajak. Ini adalah isu yang sangat relevan dengan kita yang tengah melakukan program penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak,” kata Menkeu.

Untuk menjelaskan posisi Indonesia terkait implementasi UU Pengampunan Pajak, Menkeu bertemu dengan petinggi Financial Action Task Force (FATF). Dalam pertemuan itu, Menkeu memaparkan bahwa Amnesti Pajak tidak dimaksudkan untuk memfasilitasi uang hasil kejahatan seperti *drug trafficking*, *human trafficking* maupun *money laundering* dalam rangka *financing of terrorism*.

Teks Amelia Safitri

Kemenkeu Gelar JILSE 2016



Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar Jakarta International Logistics Summit and Expo (JILSE) 2016 di Jakarta International Expo (JIE) Kemayoran, Jakarta. Mengundang 1.500 pelaku usaha logistik, acara ini berlangsung selama tiga hari, pada 19-21 Oktober 2016.

JILSE 2016 merupakan upaya lanjutan sosialisasi Pusat Logistik Berikat (PLB) serta program pemerintah di bidang logistik secara umum. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan jumlah PLB, meningkatkan volume barang yang ditimbun di PLB, serta meningkatkan pertumbuhan pemasok luar negeri yang menimbun barang di PLB. Selain itu, sosialisasi ini juga dilakukan untuk optimalisasi pencapaian tujuan PLB sebagai hub logistik regional.

Foto
Agus Tri H.

Acara yang dikemas dalam bentuk pameran ini diharapkan dapat menciptakan kesepakatan bisnis untuk memindahkan tempat penimbunan bahan baku industri Asia-Pasifik dari luar negeri ke Indonesia. “JILSE 2016 ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang PLB, mempertemukan para pemasok luar negeri, importir dalam negeri dan para pengusaha PLB. Diharapkan pemasok barang di luar negeri akan tertarik melakukan penimbunan barang di PLB,” kata Menteri Keuangan (Menkeu).

Disamping itu, acara ini juga diharapkan menjadi forum bagi seluruh pihak, antara lain pemerintah, pelaku usaha industri, pelaku usaha logistik, dan transportasi untuk berbagi pengalaman dan jaringan. “Tujuannya adalah untuk mencari solusi dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya transportasi dan logistik di Indonesia,” lanjut Menkeu.

Sebagai informasi, PLB merupakan fasilitas yang diberikan oleh Kemenkeu melalui DJBC sebagai bagian dari implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Diluncurkan pada 10 Maret 2016, fasilitas PLB bertujuan untuk: 1) mendukung distribusi logistik yang murah dan efisien; 2) mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, termasuk industri kecil dan menengah; 3) meningkatkan investasi; serta 4) menjadikan Indonesia sebagai hub logistik Asia Pasifik.

Hingga saat ini, pemerintah telah memberikan izin fasilitas PLB kepada 28 perusahaan. Sebanyak 11 perusahaan memperoleh izin saat peluncuran PLB tahap I pada 10 Maret 2016, sedangkan 17 lainnya ditetapkan sebagai penerima fasilitas PLB tahap II pada 19 Oktober 2016. Selain Bank Dunia, fasilitas PLB juga telah mendapat apresiasi dan sambutan positif dari para pelaku usaha.

Teks Novita Asri H.



Rawat Anak Dengan Kasih Sayang

Perlindungan anak merupakan salah satu topik yang paling menyentuh banyak pihak sepanjang masa. Tak terhitung lagi jumlah kasus kekerasan anak yang terjadi. Faktanya anak-anak belum mampu melindungi dan membela dirinya sendiri. Adalah Seto Mulyadi atau akrab dipanggil Kak Seto, seorang tokoh yang sepenuh hati memperjuangkan kesejahteraan anak. Saat ditemui di kediamannya, dengan antusias ia menceritakan kegelisahan dan harapannya bagi anak Indonesia.

Apa kriteria anak terlantar?

Anak dapat disebut terlantar apabila hak-haknya untuk hidup dan tumbuh dan berkembang tidak terpenuhi. Hak untuk hidup itu misalnya imunisasi, perawatan kesehatan, pemenuhan gizi, dan sebagainya. Sedangkan hak tumbuh dan berkembang misalnya kasih sayang, pengembangan potensi-potensinya,



Foto
Irma Kesuma D.

hak atas pendidikan, serta kesempatan bermain dan beristirahat.

Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka sudah termasuk penelantaran karena akan memungkinkan anak mengalami berbagai permasalahan psikologis. Anak menjadi tertekan atau bahkan melakukan perilaku menyimpang. Kalau ada anak-anak yang melakukan berbagai tindakan kriminal, sebetulnya di satu sisi mereka adalah korban pengabaian dan lingkungan yang tidak kondusif. Kita lihat banyak kasus tawuran, pembunuhan, perkosaan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh anak-anak.

Bagaimana penanganan yang tepat terhadap anak yang melakukan tindakan kriminal?

Ya harus mendapatkan perawatan psikologi kembali. Kadang-kadang kalau ada tindakan kekerasan pada anak-anak, kita lebih fokus pada pelakunya. Kita hanya berpikir bagaimana menghukum

pelaku, tapi melupakan korbannya. Banyak korban dari ekonomi menengah-bawah yang tidak mendapat perawatan psikologi yang tepat. Akhirnya apa? Justru terjadi kecacatan dan luka pada jiwanya sehingga akhirnya korban menjadi pelaku kekerasan juga di masa yang akan datang. Kita lihat pada beberapa kasus sodomi misalnya. Banyak pelaku yang sebenarnya merupakan korban sewaktu dia masih kecil.

Bagaimana Anda melihat paradigma masyarakat kita dalam memperlakukan anak?

Memang masalah adat istiadat sering bertentangan dengan konvensi internasional untuk perlindungan anak. Contohnya pada masyarakat adat Badui dalam, anak-anak tidak boleh menggunakan alas kaki, apalagi telepon genggam. Sekolah juga tidak ada. Jadi ada hak-hak anak yang mungkin terlanggar. Tetapi kalau kita langsung menyebutnya pelanggaran hak anak, mungkin mereka

juga *enggak* mau terima, harus ada pendekatan bertahap. Dimulai dengan membantu suku Badui luar yang mulai mau mengikuti perkembangan zaman.

Ratusan tahun lalu ada adat di mana anak laki-laki yang disebut *gembalak* dijadikan ‘peliharaan’ untuk menyalurkan kebutuhan biologis *warok*, penari Reog Ponorogo yang juga merupakan tetua adat. Keluarga tidak keberatan karena anak yang dijadikan gembalak dianggap menaikkan status sosial keluarga. Sementara di Papua, anak-anak lelaki yang diminta ikut perang antar suku dianggap wajar. Perlu diingat, definisi anak adalah di bawah usia 18 tahun. Selain itu, ada juga budaya yang mengharuskan anak patuh sepenuhnya pada orang tua. Padahal salah satu hak dasar anak adalah didengar pendapatnya, didengar suaranya. Nah, hal ini sering berbenturan.

Seperti apa kaitan kesejahteraan negara dengan kesejahteraan anak-anak?

Memang kesejahteraan suatu negara juga bisa dilihat dari bagaimana negara itu memperlakukan anak-anaknya. Di negara-negara maju, misalnya Jepang atau Singapura, anak-anak mendapatkan berbagai pelayanan yang memungkinkan mereka untuk terpenuhi berbagai hak-haknya tadi, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kekerasan, maupun hak untuk berpartisipasi.

Di sana, anak-anak sangat dihormati dan dilindungi. Pernah ada seorang ibu yang memarahi anaknya di kereta bawah tanah, seketika ada warga yang bilang, “tidak, jangan, tidak boleh begitu.” Jadi anak-anak betul-betul dijaga kondisi psikologisnya supaya proses tumbuh dan kembangnya optimal. Seharusnya mereka menjadi seorang yang hebat. Tetapi adanya tekanan psikologis dari orang tua atau karena cara mendidik yang keliru, pertumbuhan anak untuk menjadi manusia unggul menjadi terhambat.

Bagaimana memberi dukungan kepada orangtua yang tidak dapat hadir pada masa pertumbuhan anak?

Saya mengutip kata-kata Hillary Clinton, “Mendidik anak perlu orang sekampung.” Begitu juga dengan melindungi anak, perlu orang sekampung. Sebab itu, perlu pemberdayaan masyarakat. Apalagi suasana gotong royong sudah tercipta di masyarakat kita melalui RT-RW yang bisa saling membantu.

Jadi kalau ada ibu yang bingung karena berbagai pemasalahan, tetangga perlu ikut membantu. Kalau ada ibu yang memukuli anaknya, tetangga juga perlu menegur, jangan begitu caranya. Saya kira, hanya dengan memberdayakan warga untuk bersama-sama mengasuh, mendidik, dan melindungi anak kesejahteraan anak bisa ditingkatkan.

Bagaimana cara mengurangi dampak negatif pada anak dengan kebutuhan khusus?

Anak-anak difabel ini jangan ada diskriminasi. Perhatian untuk mereka harus luar biasa. Adalah keliru jika melihat mereka sebagai beban. Para orang tua dan pengasuhnya harus sangat sabar. Sudah kewajiban kita untuk memberikan sarana dan prasarana yang bukan hanya memudahkan hidup mereka namun juga memberdayakan mereka untuk bisa mandiri dan tidak bergantung selamanya pada orang lain. Saat ini berbagai perguruan tinggi sudah menyiapkan sumber daya manusia untuk pendidikan luar biasa. Mohon teori-teori yang didapatkan dapat dipraktekkan sebaik mungkin.

Jumlah anak yang berkebutuhan khusus ini ada sekitar 2.5 persen. Angka ini tidak perlu dikeluhkan, *enggak* terlalu banyak. Orang tuanya juga perlu dibekali dengan pelatihan mendidik anak difabel. Orang tua sepatutnya bangga dan bahagia karena telah dipercaya oleh Tuhan yang maha kuasa untuk mengasuh anak-anak yang istimewa.

Sejauh mana dampak sosial ekonomi terhadap penelantaran anak?

Suasana psikologis yang nyaman berkaitan erat pada kemampuan siapapun dalam berkarya dan berprestasi. Kalau hal itu tidak terpenuhi, dengan sendirinya akan menghambat seseorang untuk menghasilkan karya-karya berbobot yang menggerakkan ekonomi. Bung Karno pernah mengatakan, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.” Artinya, kita harus belajar dari masa lalu. Indonesia bisa seperti saat ini karena jasa pahlawannya. Tetapi kita juga jangan lupa masa depan. Siapa yang nanti akan menjadi pemimpin dan membangun negara? Tentunya anak-anak kita. Jadi saya tambahkan, bangsa yang

besar adalah bangsa yang menghargai dan mencintai anak-anak. Persiapkan anak-anak untuk menjadi pribadi unggul di masa depan dengan pendekatan yang penuh dengan kasih sayang.

Jika dilihat dari sisi fasilitas publik, fasilitas apa yang perlu mendapat perhatian?

Selain membangun manusianya, membangun infrastruktur ramah anak juga penting. Kondisi terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya harus nyaman untuk anak-anak berpergian, termasuk anak yang difabel. Misalnya dengan menyediakan jalur khusus bagi pengguna kursi roda. Salah satu fasilitas publik yang menurut saya cukup bagus adalah taman ramah anak yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta. Contoh lainnya adalah gelanggang remaja yang dibangun oleh Bang Ali, gubernur Jakarta tahun 60-an. Ruang publik seperti ini perlu dilanjutkan agar energi anak-anak remaja bisa tersalurkan secara positif.

Apa pesan Anda untuk seluruh masyarakat Indonesia?

Semua anak ibarat bibit unggul. Mereka akan akan tumbuh dan merekah menjadi bunga yang elok kalau ditanam di tanah yang subur, diberi pupuk, dan disiram dengan teratur dengan penuh kasih sayang. Jika tanah tersebut tandus dan terbenkakai, lama-lama bunga tersebut layu sebelum berkembang. Untuk menjadi negara dengan ekonomi yang kuat, harus dimulai dengan merawat calon-calon pelaku ekonomi masa depan. Untuk itu, diperlukan komitmen pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang layak anak sesuai deklarasi PBB tahun 2002 untuk menciptakan A World Fit For Children.

Teks Irma Kesuma

Lebih Semangat di Gedung Baru

BDK Pontianak, BPPK



Foto
Bagus Wijaya

Pontianak dikenal sebagai Kota Khatulistiwa sekaligus ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Di kota penghasil lidah buaya ini berdiri sebuah Balai Diklat Keuangan yang berada di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Visi BDK Pontianak yaitu menjadi pengelola diklat terunggul dan dipercaya masyarakat dalam menghasilkan manusia yang profesional di bidang keuangan negara di daerah.

Balai Diklat Keuangan (BDK) Pontianak didirikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kepala BDK Pontianak Fariz Wazdi kepada Media Keuangan mengungkapkan suka duka saat BDK ini pertama kali beroperasi hingga perkembangannya kini.

Sebelumnya, BDK Pontianak berlokasi di sebuah gedung arsip di Jalan Sultan Abdurrahman No. 31 Pontianak. “Tempatnya tidak terlalu luas. Ada tiga kelas di lantai dua, sedangkan lantai satu difungsikan untuk kantor,” kenang Fariz, sapaan akrabnya. BDK Pontianak saat itu hanya terdiri dari tujuh pegawai, yaitu satu orang pejabat Eselon III, tiga orang pejabat Eselon IV, dan tiga orang pelaksana. Keterbatasan lokasi dan sumber daya manusia lantas tak membuat jajaran pegawai BDK Pontianak patah semangat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan keuangan, BDK Pontianak membawahi empat kantor wilayah dan 63 satuan kerja (satker). Empat kantor wilayah (Kanwil) Provinsi Kalimantan Barat tersebut diantaranya Kanwil Direktorat Jenderal

(Ditjen) Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara. Diklat pertama yang diselenggarakan BDK Pontianak terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2009. Saat itu pula, BDK Pontianak juga dipercaya untuk menyelenggarakan pendidikan Diploma I Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Bulan Oktober 2016 ini, BDK Pontianak genap memasuki masa 7 tahun pengabdian sebagai pengelola diklat yang dipercaya masyarakat. Selama kurun waktu itu, BDK Pontianak telah mengalami banyak perkembangan. Salah satu keunggulannya yaitu dipercaya untuk menjalin kerja sama dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pontianak. Dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, BDK Pontianak menyumbang cukup banyak pegawai yang melanjutkan Diploma IV STAN. Hal

ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sangatlah mumpuni dan berdaya saing.

Seperti struktur BDK pada umumnya, BDK Pontianak dipimpin oleh satu orang kepala balai yang membawahi subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal, subbagian Penyelenggaraan Diklat, dan subbagian Evaluasi Diklat. Total saat ini ada 44 pegawai.

Gedung Baru

Seluruh jajaran BDK Pontianak kini tengah berbenah setelah menempati gedung baru sejak April 2016 lalu. Gedung yang berlokasi di Jalan Supadio Km. 8,8 Pontianak ini memang sudah difungsikan

meski pembangunannya belum sepenuhnya selesai. Gedung baru ini juga akan dilengkapi dengan asrama untuk menambah kenyamanan para peserta diklat. Pembangunan asrama ditargetkan selesai akhir tahun ini.

Fariz mengakui, pembangunan ruang kelas yang masih belum selesai juga berdampak pada kegiatan diklat reguler. Diklat reguler baru bisa berjalan tahun depan sesuai dengan anggaran pengadaan tahun 2017. Agar kegiatan belajar mengajar berjalan baik, tidak hanya bangunan ruang kelas yang dipersiapkan, namun juga sarana penunjang pendidikan, seperti proyektor, komputer, dan sebagainya.

BDK Pontianak tak hanya serius dalam menjaga kualitas diklat, namun juga berusaha memberikan pelayanan baik kepada para peserta diklat. Selain pembangunan asrama yang tengah dirampungkan, fasilitas penunjang juga telah direncanakan untuk menambah kenyamanan peserta. Seperti beberapa BDK lainnya, BDK Pontianak berharap kelak bisa memiliki fasilitas penunjang mumpuni, seperti lapangan tenis dan karaoke set.

Kerja sama diklat

Dalam menjalankan program pendidikan dan pelatihan, BDK Pontianak membina hubungan baik dengan beberapa *stakeholders*, seperti dosen dan praktisi di perusahaan swasta. Keterbatasan widyaiswara dan pengajar STAN membuat sebagian besar pengajar berasal dari luar Kementerian Keuangan. Kerja sama BDK Pontianak dengan Universitas Tanjungpura (Untan) dilakukan dalam

diklat bahasa Inggris dan akuntansi. Diklat pelayanan prima diselenggarakan dengan mengundang pengajar dari Bank Mandiri sebagai *best practice*. Untuk pengajar kedisiplinan dalam diklat prajabatan, BDK Pontianak menjalin kerja sama dengan Paskhas Pontianak (Korps Pasukan Khas).

Selain empat Kanwil Kementerian Keuangan, potensi *trainee* atau peserta diklat BDK Pontianak juga meliputi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. BDK Pontianak sebagai pelaksana pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara berkesempatan menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintah pusat. Ke depan, BDK Pontianak berencana menyusun diklat bertema dana desa, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus untuk pegawai pemerintah kota dan pemerintah provinsi.

Selaras dengan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan kini tengah menyongsong pembentukan Kemenkeu Corporate University. Hal ini membuat semakin besarnya tuntutan sumber daya manusia yang baik di bidang keuangan negara. BDK Pontianak pun siap menjawab tantangan ini. Dalam penyusunan diklat, BDK Pontianak juga akan mengacu pada diklat Kemenkeu Corporate University. Empat karakteristik diklat Kemenkeu Corporate University antara lain *Impactful* (berdampak), *Relevant* (relevan), *Accessible* (mudah diakses), dan *Applicative* (aplikatif).

Teks Pradany Hayyu

Sony Loho, Dirjen Kekayaan Negara

MENIKMATI HIDUP

“Tak usah mempersulit hidup. Hidup itu tidak lama.
Kalau tidak dinikmati (maka) rugi sendiri. Saya
percaya Tuhan sudah atur semua. Kalau kita benar,
Tuhan juga perhatiin.”

Suatu hari di sebuah lapangan di bilangan Kebayoran Lama, tampak sebilah bambu kecil diletakkan di antara dua buah batu berukuran nyaris sama. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki memukul keras-keras bilah bambu kecil itu dengan bambu lain yang berukuran tiga kali lebih besar.

Setelah berhasil terlontar jauh, si pelembar langsung berlari menuju batu landasan. Sementara anak lainnya berusaha menangkap bilah bambu yang terlempar. Permainan yang dikenal dengan nama *gatrik* ini mungkin jarang diketahui oleh anak-anak generasi millennium ke bawah. Sebaliknya, permainan ini justru sangat populer di era 1960-an.

Itulah sekelumit gambaran masa kecil Vincentius Sonny Loho, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, yang jauh dari kata serba modern. Dibesarkan di Jakarta tempo dulu, Sonny – panggilan akrabnya, lebih lekat dengan permainan tradisional seperti gatrik, layangan, kelereng, maupun permainan ular tangga.

Memiliki ayah seorang pegawai negeri sipil di Departemen Perdagangan, anak pasangan Oscar Loho dan Lies Ranti ini diajarkan untuk hidup disiplin. “Bapak saya disiplin, dia tertib, jadi kami sudah biasa disiplin. Kalau ibu lebih rileks (santai), jadi ada *balancing* di rumah. Kalau bapak tegas, (maka) ibu sering membela anaknya,” kenangnya.

Anak kelima dari enam bersaudara ini bercerita, kedua orang tuanya tidak pernah memaksanya untuk belajar. Meski demikian, kedua orangtuanya menanamkan prinsip tanggung jawab pada seluruh anak-anaknya, misalnya dengan membebaskan anak-anaknya mengatur sendiri waktu belajar dan bermain.

Mengalir

Usai menamatkan sekolah di SMA Pangudi Luhur, pria kelahiran Jakarta 1 Juni 1957 ini diajak seorang temannya untuk mendaftar ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Setelah mengikuti ujian masuk, akhirnya Sonny diterima sebagai mahasiswa Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi angkatan ketiga.

Setelah menyelesaikan pendidikan di tahun 1980, Sonny ditempatkan di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) Lampung, yang kini dikenal sebagai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ditempat tersebut, Sonny belajar menjadi seorang auditor yang bertugas mengawasi pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah.

Beberapa tahun berselang, Sonny mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan Diploma IV Akuntansi Keuangan STAN. Pasca lulus, Sonny dipindahkan ke Pusat Pembukuan Keuangan Negara, Sekretariat Jenderal yang kemudian menjadi Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN). Ditempat tersebut dipercaya sebagai Kepala Subbagian Verifikasi I di Biro Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Bagian Akuntansi Bendahara Umum, BAKUN.

Tiga tahun menjabat, Sonny mengikuti test untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2. Sonny yang mulanya hanya ingin meneruskan kuliah di dalam negeri tetapi malah diterima di luar negeri hingga berhasil meraih gelar Master of Public Management di Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat di tahun 1998.

Sepulangnya ke tanah air, Sonny diangkat sebagai Kepala Bagian Bimbingan Akuntansi Instansi, Biro Pembinaan Sistem Akuntansi Negara.

Pada tahun 2001, ia dipercaya sebagai Kepala Bidang Bina Akuntansi Keuangan Departemen dan Lembaga dan pada 2003 menjabat sebagai Kepala Bidang Sistem dan Standar Akuntansi. Saat itu, Sonny terlibat sebagai tim Rancangan Undang-Undang bidang Keuangan Negara.

Kemudian, terjadi reorganisasi di tubuh Kementerian Keuangan, sehingga BAKUN dilebur serta berubah menjadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada saat itu, Sonny menjabat Kepala Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Informasi dan Akuntansi, Ditjen Perbendaharaan. Selanjutnya pada 2006, Sonny diangkat sebagai Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Lalu, Sonny dipercaya sebagai Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada 2008.

Berbekal latar belakang auditor saat masih menjadi pelaksana di DJPKN dan menghadapi audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Sonny diberi amanah menjadi Inspektur Jenderal di tahun 2011. Masa-masa menjadi Irjen, Sonny menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan pertama ialah mengubah paradigma Inspektorat Jenderal dari semula sekedar berperan sebagai *watch dog* kini harus beralih menjadi *strategic business partner*.

“Jangan cuma mengawasi orang. Kalau bisa, kasih konsultasi dan katalisator. Kalau konsultasi, kita diskusi, boleh atau tidak (pekerjaan itu), kita kasih *assurance*. Kalau katalisator, kita bantu mempercepat perbaikan. Biasanya orang maunya mengawasi dibiarkan bikin salah dulu baru diperiksa. Jangan. Sebelum orang salah, dikasih tau dulu. Ini tantangan cukup berat,” ungkapnya.

Tantangan berikutnya ketika pegawai pajak Kementerian Keuangan melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan penggelapan senilai miliaran rupiah.



Foto
Arfindo B. S.

Pemerintah langsung berbenah, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus-kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak untuk mempercepat penyelesaian kasus.

Lima tahun berperan sebagai pengawas internal, Sonny dipercaya memegang amanah di bidang lain. Tahun 2015, ia dipercaya mengelola aset negara sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Ditempat inilah, Sonny melihat banyak hal yang harus dibenahi karena perubahan paradigma DJKN dari semula berperan sebagai *asset administrator* menjadi *asset manager*.

“Awalnya bereskan aset supaya tercatat dengan baik, tapi sekarang DJKN mesti berubah mengelola aset supaya optimal manfaatnya. Jangan sampai aset nganggur, tidak dipakai tapi biaya *maintenance* keluar. Sebaiknya (dimanfaatkan) untuk Kementerian/Lembaga, bisa juga kita gunakan supaya menghasilkan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk mendukung fiskal. Kalau perlu kerja sama swasta,” tuturnya.

Sepanjang karirnya, kehidupan Sonny bagaikan air yang mengalir, menikmati

perjalanannya dengan tenang, tetapi tetap diiringi tanggung jawab tinggi. Walaupun kerap bergelut dengan pekerjaan yang tak kenal waktu, dimata suami dari Widrianti Sih Pangastuti ini, keluarga tetap paling utama. Baginya, keluarga berpengaruh besar dalam mendukung profesinya sebagai abdi negara.

Ke depan, Sonny tidak menargetkan sesuatu yang tinggi. Menurutnya, Tuhan sudah memberikan kesehatan, pekerjaan dan keluarga yang harmonis. Ia hanya berharap dapat melakukan yang terbaik bagi keluarga, organisasi, lingkungan, serta masyarakat dalam kapasitasnya. “Hidup itu dinikmati saja. Kita selalu berusaha untuk yang terbaik. Kalau mikir mau jadi apa nanti dikejar-kejar stres sendiri. Jadi, jalanin aja.”

Lukisan dan batu akik

Disela kesibukannya, Sonny ternyata memiliki kegemaran melukis. Menurut pecinta aliran naturalisme ini, kegemarannya berawal dari pertemuan dengan seorang guru gambar. Sejak itulah, Sonny terinspirasi untuk belajar menggoreskan kuas di kanvas.

Kecintaannya pada seni lukis, membuat ayah dari Maheswari Cathrenia Dionny Loho ini memiliki puluhan lukisan, baik yang terpajang apik dikediamannya maupun tertata di ruang kerjanya. “Ada lebih dari 50 lukisan, saya tidak pernah hitung. Terakhir sudah berhenti koleksi, tidak ada tempat lagi,”ujar penggemar karya Basuki Abdullah, dan Antonio Blanco.

Selain mengoleksi lukisan, Sonny juga diketahui memiliki batu cincin yang jumlahnya tidak sedikit. Sonny bercerita bahwa mulanya mengumpulkan batu cincin merupakan hobi kakak pertamanya. Sejak tahun 1970-an, sang kakak yang berprofesi sebagai arsitek sudah menyukai batu cincin. Kemudian suatu hari, Sonny diberikan batu cincin itu oleh sang kakak.

“Saya dulu dikasih 1-2, lalu dipakai. Kakak saya kalau ada batu yang aneh, bagus, langka, dia kasih tau. Dia selalu dapat harga jauh di bawah harga karena sudah punya komunitas sendiri. Bahkan dia bisa dapat harga sepersepuluh dari harga pasaran. Awalnya saya tidak terlalu mengerti, tapi (lama-lama) jadi sedikit mengerti juga,” tuturnya.

Teks lin Kurniati

Masih Banyak Potensi Peserta Amnesti Pajak

Tulisan tangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang berisi apresiasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas pencapaian amnesti pajak periode pertama menjadi viral di dunia maya. Dalam suratnya untuk Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiateadi beserta seluruh pegawai DJP pada akhir September lalu, Menkeu menyampaikan terima kasih atas kerja ekstra keras dan dedikasi para pegawai.

“Pagi, siang, malam, hingga dini hari terus menerus berganti giliran, semua ikut terjun menanggapi antusiasme masyarakat yang membludak, dengan penuh kesabaran, perhatian, senyum, semangat membantu, dan semangat untuk menunjukkan bahwa DJP adalah lembaga yang bisa dipercaya, disegani, dibutuhkan, dan dihormati oleh rakyat,” kata Menkeu dalam surat tersebut.

Menkeu berharap, hasil pencapaian program amnesti pajak tahap I dapat menjadi modal berharga bagi semua pihak untuk membangun, mereformasi, dan memperbaiki DJP. Keberhasilan program amnesti pajak ke depan masih akan membutuhkan perhatian dan dukungan dari rakyat, presiden, dan

seluruh *stakeholders* pajak. “Saya sangat menghargai dan akan terus mendorong upaya bersama mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016. Juga upaya untuk mencapai perbaikan basis pajak dan *tax ratio*. Kita juga harus terus membangun, memperkuat, dan menjaga kepatuhan membayar pajak masyarakat Indonesia untuk Indonesia yang adil dan makmur. Selamat!” ujar Menkeu dalam surat yang sama.

Pada konferensi pers perkembangan terkini program amnesti pajak yang diselenggarakan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (14/10), Menkeu menilai masih banyak peserta potensial pada periode II dan III. Hal ini bisa dilihat dari masih sedikitnya jumlah peserta amnesti pajak periode pertama, jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak (WP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Secara geografis, Menkeu melanjutkan, jumlah peserta amnesti pajak di wilayah DKI Jakarta, termasuk Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Khusus, tercatat sebanyak 134.512 WP. Angka tersebut baru sebesar 6,4 persen dari jumlah WP yang wajib melaporkan SPT-nya, yakni 2.088.747 WP.

Sementara jika dilihat dari total keseluruhan peserta di dalam dan luar negeri, amnesti pajak telah diikuti oleh 405.405 peserta. Deklarasi harta yang dilaporkan hingga Rabu (12/10) mencapai Rp3.826,81 triliun dan uang tebusan sebesar Rp93,49 triliun. Peserta amnesti pajak masih didominasi oleh WP Orang Pribadi, yaitu 321.893 peserta dengan jumlah uang tebusan mencapai Rp83 triliun dan deklarasi harta sebesar Rp3.322,26 triliun.

Sementara itu, terdapat 64.334 WP UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang telah mengikuti program amnesti pajak. Jumlah tebusan yang diterima sebesar Rp2,99 triliun dan deklarasi harta Rp254,38 triliun. Dari kategori WP Badan tercatat sebanyak 83.512 badan yang telah turut serta dengan jumlah uang tebusan sebesar Rp10,49 triliun dan deklarasi harta sebesar Rp504,55 triliun.

Dalam paparannya, Menkeu merinci deklarasi harta sebesar Rp3.826,81 triliun terdiri atas deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp2.703 triliun, atau sekitar 70,63 persen. Sementara deklarasi harta luar negeri sebesar Rp981,04 triliun atau sekitar 25,64 persen. Untuk repatriasi,

Konferensi
Pers: Evaluasi
Amnesti Pajak
Periode I dan
Taxbase Pasca
Amnesti Pajak di
Aula Mezzanine
Gedung Djuanda
I pada Jumat
(14/10).

Foto
Langgeng W. P.



total dana yang terkumpul sebesar Rp142,77 triliun atau sekitar 3,73 persen.

Momentum membangun kepercayaan

Dalam kesempatan berbeda, Menkeu berharap program amnesti pajak bisa menjadi titik balik bagi pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan yang pernah luntur antara pembayar pajak dan negara. “Tanpa ada penerimaan pajak, muskil bagi kita untuk membuat program-program kemiskinan yang bisa menyelesaikan dan memotong rantai kemiskinan antar generasi,” kata Menkeu saat menjadi pembicara dalam acara Supermentor yang berlangsung Senin (17/10) di Gedung Djakarta Teater, Jakarta.

Menkeu juga mengajak masyarakat untuk dapat memberikan kontribusinya kepada negara. Kontribusi ini dapat berbentuk dengan membayar pajak secara benar dan berpartisipasi untuk ikut mengawal implementasi dari pajak yang dibayarkan. “Sebuah negara maju, masyarakat peduli dan mengkritisi secara benar (pengelolaan pajak),” kata dia. Menkeu meyakini pajak dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan. “Mengentaskan kemiskinan memang

berat, tapi bisa dilakukan,” lanjut Menkeu lagi.

Perluasan basis data

Ditemui di tempat terpisah, Menteri Keuangan periode 2013-2014, Chatib Basri memberikan apresiasi terhadap capaian program amnesti pajak periode pertama. Dalam wawancara dengan Media Keuangan di Kantor C-Reco Consulting di Jakarta, Selasa (18/10), Chatib mengatakan bahwa partisipasi masyarakat yang besar dalam program amnesti pajak adalah hal yang menggembirakan.

Chatib melihat pencapaian amnesti pajak dalam dua perspektif. Untuk peserta WP besar, dia berpandangan secara rasional, mereka akan memanfaatkan amnesti karena “pinalti” yang relatif rendah. “Kapan lagi bisa melakukan deklarasi aset dan menyelesaikan masalah pajak, sehingga ke depan *they can come clean*. Apalagi ada juga desakan dan dorongan mulai dari Presiden sampai dengan Menkeu untuk mengikuti program ini,” ujarnya.

Sementara dari perspektif kedua, Chatib menilai apresiasi perlu diberikan kepada para WP yang tergolong kecil dan

antusias mengikuti program amnesti. “Kita melihat masyarakat berduyun-duyun datang ke kantor pajak dan antri di sana. Hal ini hanya bisa dilakukan karena ada faktor *trust* kepada DJP,” kata Chatib. Menurut dia, kepercayaan yang diberikan publik terhadap DJP memang belum sempurna. Namun, partisipasi masyarakat secara keseluruhan terhadap program amnesti pajak pada periode pertama bisa menjadi modal untuk menyukseskan periode kedua dan ketiga.

Keberhasilan awal program amnesti pajak juga memberikan pelajaran penting kepada jajaran pegawai DJP yang bertugas di lapangan. “Pegawai DJP jadi bisa belajar menghadapi WP dengan berbagai pertanyaan. Kita bisa berangkat dari titik ini untuk menarik WP yang kemarin belum ikut,” ujar Chatib. Oleh karena itu, Chatib melihat upaya sosialisasi tetap penting untuk dilakukan.

Optimalisasi repatriasi

Apresiasi juga datang dari Direktur Utama INDEF, Enny Sri Hartati. Ditemui Media Keuangan di kantornya di Jakarta Selatan, Kamis (13/10), Enny mengungkapkan bahwa deklarasi harta pada program amnesti periode pertama

bisa dikatakan membuat program ini berhasil. Pada periode kedua dan ketiga, Enny berharap pemerintah dapat lebih mengoptimalkan capaian repatriasi, terutama repatriasi dari luar negeri. “Menurut saya, seperti di dalam Undang-Undang (UU) Amnesti Pajak, sejak awal tujuan program ini *kan* memang repatriasi,” kata Enny.

Proyek infrastruktur adalah salah satu media untuk mengoptimalkan penyerapan dana repatriasi. Enny menyambut baik pencaangan 30 proyek strategis oleh Komite Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang akan didanai dari hasil repatriasi. Menurutnya, sejak awal UU Amnesti Pajak disahkan sebetulnya pemerintah diharapkan telah siap dengan proyek-proyek

infrastruktur yang sudah selesai tahapan proses kelayakannya. Jika pemberi garansi dari proyek-proyek itu adalah pemerintah, Enny meyakini investor tak meragukan keberlangsungan proyeknya. “Pemerintah mestinya sudah mempunyai studi komprehensif. Proyek strategis diharapkan bukan hanya *list*,” kata Enny.

Terkait dengan pembentukan Gugus Tugas dalam Implementasi Amnesti Pajak oleh Presiden Jokowi belum lama ini, Enny juga memberikan dukungan. Namun, dia memberikan catatan bahwa keberadaan gugus tugas diharapkan tidak hanya berfokus pada menarik lebih banyak peserta program amnesti dan meraih dana sebanyak-banyaknya. “Kalimat yang saya harap dapat temukan di dalam Keputusan Presiden Nomor 32

tahun 2016 tentang gugus tugas tersebut adalah misalnya bagaimana memberikan keyakinan WP untuk melakukan repatriasi dan tentu bagaimana dana-dana amnesty pajak bisa membiayai program-program prioritas,” ujar Enny.

Pada pelaksanaan periode II dan III, Enny memprediksi tren peserta tidak akan jauh berbeda. Namun, jika pemerintah bisa meluncurkan kebijakan-kebijakan terobosan, bukan tidak mungkin tren peserta dapat meningkat. Kebijakan terobosan yang bisa dijalankan misalnya dengan memberikan kemudahan akses terhadap kredit bagi golongan pengusaha menengah. “Terobosan ini juga bisa membuat pelaku usaha semakin yakin, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah meningkat,” kata Enny.

” Komentor Pakor



Chatib Basri
Menteri Keuangan
Periode 2013-2014

”Persoalan dalam penerimaan pajak kita adalah *database* yang lemah, apalagi masih ada restriksi dari UU Perbankan terhadap akses pajak. Kebijakan amnesty pajak dapat memperluas *database* secara signifikan. Kita punya data yang sangat banyak, sekarang bagaimana memanfaatkan data ini untuk penerimaan yang *sustainable*. Pembentukan Gugus Tugas dalam Implementasi Amnesti Pajak saya pikir baik, tapi perlu koordinasi dengan DJP sebagai institusi utama yang mengelola pajak.

Di sisi lain, yang penting juga adalah bagaimana pemerintah menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat bisa terasa manfaatnya. Jadi orang bayar pajak itu bukan sekadar uang mereka diambil. *Improvement* dalam penyediaan *public goods* yang lebih baik itu penting.”



Enny Sri Hartati
Direktur INDEF

”Pekerjaan rumah pemerintah sekarang adalah mengoptimalkan repatriasi. Kunci untuk melakukan itu adalah dengan mengembalikan kepercayaan dunia usaha, terutama bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif. Proses *debottlenecking* hambatan investasi harus diselesaikan. Jadi kalau persoalan ini selesai, repatriasi itu bisa masuk dengan sendirinya.

Saya yakin target dana tebusan dalam program amnesti pajak bisa tercapai. Kalaupun tidak, hasilnya tidak akan terlalu jauh dari Rp165 triliun. Terkait dengan pendekatan terhadap pengusaha UMKM, saya berpandangan pemerintah dapat fokus kepada pengusaha menengah. Apalagi jumlahnya lebih besar dari pengusaha kategori besar. Karena tarif amnesty pajak untuk pengusaha UMKM bersifat flat, mungkin akan lebih banyak pengusaha yang memilih ikut di akhir periode, kecuali pemerintah memberikan insentif kepada mereka yang bersedia ikut lebih cepat.”

Teks Dwinanda Ardhi



jika menemukan PUNGLI di Kementerian Keuangan LAPOR WISE

dengan menggunakan aplikasi WISE (Whistleblowing System) Kementerian Keuangan akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower

WISE - Inspektorat Jenderal
Gedung Djuanda II Lantai 6

telp.
021-3454236

sms.
08159966662.

email.
pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id

website.
<http://www.wise.kemenkeu.go.id/>

Tantangan Pembangunan Provinsi Termuda

Teks Tri Wibowo

Pada tanggal 25 Oktober 2012, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) disahkan menjadi provinsi termuda di Indonesia melalui rapat paripurna di DPR. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2012 ditetapkan sebagai payung hukum pembentukan provinsi tersebut. Provinsi Kaltara merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, tepatnya Negara Bagian Sabah dan Serawak. Terbentuknya Provinsi Kaltara bukan tanpa pro dan kontra. Pihak yang pro berpendapat bahwa pembentukan provinsi ini bukan semata karena pertimbangan ekonomi. Pertimbangan geopolitik dan kedaulatan negara juga

menjadi faktor utama. Pembentukan Provinsi Kaltara diharapkan menghidupkan ekonomi masyarakat yang selama ini dianggap tertinggal dan tergantung kepada Malaysia. Banyak warga perbatasan yang membeli produk dari Malaysia. Mata uang Malaysia (Ringgit) bahkan menjadi alat pembayaran yang lebih sering dipakai dibandingkan Rupiah. Di samping itu, kontrol pemerintah yang terlalu jauh mengakibatkan pelayanan menjadi kurang optimal dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat perbatasan. Sementara itu, pihak yang kontra berpendapat bahwa yang lebih dibutuhkan adalah peningkatan pelayanan publik, bukan penciptaan

daerah baru. Pemekaran daerah hanya akan menambah beban keuangan negara, yang pada akhirnya menambah jumlah daerah tertinggal. Selain itu, terdapat beberapa pemekaran daerah yang dianggap kurang berhasil. Memasuki tahun keempat berdirinya Provinsi Kaltara, geliat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat mulai terlihat. Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan pada semua kabupaten dan kota secara keseluruhan mengalami perbaikan yang signifikan. Namun demikian, pembangunan infrastruktur masih belum



2014 sebesar Rp95,5 juta, dua kali lipat lebih dibanding PDRB per kapita nasional yang sebesar Rp42,4 juta. Struktur perekonomian Provinsi Kaltara masih didominasi oleh sektor pertambangan. Sektor pertambangan memberikan kontribusi sebesar 32 persen terhadap PDRB provinsi Kaltara. Sektor pertanian menempati urutan kedua dengan kontribusi sebesar 17 persen. Dari sisi kemiskinan, pada September 2015 penduduk Provinsi Kaltara yang berada di bawah garis kemiskinan hanya berjumlah 41 ribu jiwa atau sebesar 0,1 persen dari jumlah penduduk miskin nasional. Dengan jumlah penduduk miskin tersebut, Provinsi Kaltara merupakan yang terbaik dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi Kaltara juga unggul dari sisi pasar tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja di wilayah Kaltara pada Februari 2015 mencapai 287 ribu orang, yaitu terdiri atas pekerja sebesar 270 ribu orang dan penganggur sebanyak 17 ribu orang. Tingkat pengangguran di Provinsi Kaltara tercatat sebesar mencapai 5,79 persen atau hampir sama dengan tingkat pengangguran nasional yang besarnya mencapai 5,7 persen. PDRB Provinsi Kaltara atas dasar harga berlaku pada 2013 tercatat sebesar Rp41,9 triliun. Komponen ekspor mencapai Rp42,4 triliun dan impor Rp21,4 triliun. Dengan demikian, komponen net ekspor mencapai Rp21 triliun (51 persen). Dengan komponen ekspor yang sangat dominan, PDRB Provinsi Kaltara sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global. **Perlunya membangun infrastruktur** Setelah empat tahun berjalan, pembangunan di Provinsi Kaltara mulai membuahkan hasil. Hal ini tampak dari

pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tingkat pengangguran terbuka yang menurun, dan tingkat kemiskinan yang berkurang. Meskipun sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, pembangunan ekonomi di sana masih berjalan tidak seimbang. Hampir separuh aktivitas perekonomian terfokus di Kota Tarakan. Sepertiga dari jumlah penduduk provinsi juga terkumpul di Kota Tarakan yang merupakan pusat ibukota provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 906 jiwa per km². Padahal, luas Kota Tarakan hanya 300 km² atau setara dengan 0,3 persen luas wilayah provinsi. Kondisi di atas akan menjadi kurang produktif bagi pengembangan Provinsi Kaltara secara keseluruhan. Pengembangan agaknya perlu diarahkan ke Kabupaten Nunukan sebagai peyangga perekonomian kedua setelah Kota Tarakan. Jika melihat data statistik, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nunukan belum mampu meningkat, bahkan mengalami penurunan setelah terjadi pemekaran. Program pembangunan Provinsi Kaltara perlu diarahkan pada pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan dan listrik. Dengan infrastruktur yang memadai, akan tercipta titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang membuka lapangan kerja, sehingga tidak terkonsentrasi di ibu kota provinsi saja. Apalagi, Provinsi Kaltara memiliki Indeks Kesulitan Geografis yang menempati peringkat ketiga terendah. Artinya, provinsi ini merupakan daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi, yaitu tercermin dari kondisi jalan dan listrik. Pembangunan infrastruktur menjadi tantangan pembangunan provinsi termuda itu. Dari total panjang jalan

provinsi sepanjang 450 km, lebih dari separuhnya berada dalam kondisi rusak dan rusak berat(249 km). Hanya terdapat sepertiga (153 km) jalan provinsi yang berada dalam kondisi baik. Jalan provinsi sepanjang 450 km dilihat dari jenis permukaan juga belum memadai. Sebesar 57 persen terdiri atas jalan aspal, 10 persen kerikil, dan 37 persen sisanya masih merupakan jalan tanah. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada kelancaran distribusi barang antar daerah, sehingga menghambat aktivitas perekonomian provinsi secara keseluruhan.

Dari infrastruktur listrik, dilihat dari jumlah desa dan kelurahan yang sumber penerangan rumah tangganya menggunakan listrik, cakupannya juga harus diperluas. PLN baru mampu menjangkau 180 desa atau sekitar 32 persen dari jumlah desa dan kelurahan di Provinsi Kaltara. Sebanyak 380 desa atau sebesar 67 persen mengakses listrik dari sumber non-PLN. Sementara itu, masih terdapat tujuh desa atau 1 persen dari jumlah desa dan kelurahan yang belum mampu menikmati listrik sebagai sumber penerangan rumah tangganya. Ketersediaan akses listrik suatu desa sangat diperlukan untuk menumbuhkan ekonomi kreatif serta meningkatkan efisiensi usaha masyarakat. Ketersediaan listrik sangat erat hubungannya dalam menekan angka kemiskinan.

Struktur APBD

Jika dilihat struktur APBD-nya,

total pendapatan Provinsi Kaltara masih didominasi oleh Dana Perimbangan. Sebesar 70-80 persen total penerimaan daerah merupakan dana perimbangan, yang sebagian besar adalah Dana Bagi Hasil (DBH). Kontribusi DBH pada 2014 bahkan mencapai 74 persen. Melemahnya harga komoditas telah mengakibatkan penerimaan DBH menurun drastis. DBH yang diterima oleh Provinsi Kaltara pada 2014 sebesar Rp5,6 triliun menurun menjadi Rp2,2 triliun pada 2015.

Kondisi ini mengakibatkan Dana Perimbangan mengalami penurunan dari Rp6,3 triliun pada 2014 menjadi Rp4,2 triliun pada 2015. Kontribusi DBH pada 2015 pun hanya tinggal mencapai 47 persen.

Sebaliknya, komponen Dana Alokasi Umum (DAU) terus menunjukkan peningkatan. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terjadi peningkatan yang sangat signifikan. PAD Provinsi Kaltara pada 2014 sebesar Rp321 miliar naik menjadi Rp721 miliar pada 2015. Kenaikannya sungguh fantastis, yaitu mencapai 125 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian fiskal Provinsi Kaltara yang semakin membaik.

Dari sisi belanja, berkurangnya penerimaan daerah mengakibatkan anjloknya belanja modal. Belanja modal menurun dari Rp4,9 triliun pada 2014 menjadi Rp3,1 triliun pada 2015. Fakta ini menjadi tantangan tersendiri di tengah pembangunan yang sedang berlangsung. Pengurangan belanja daerah dilihat

dari fungsinya paling besar terjadi pada belanja untuk pelayanan umum. Belanja ini turun dari Rp3,5 triliun menjadi Rp2,6 triliun.

Penutup

Sebagai provinsi termuda yang baru memasuki tahun keempat berdiri, pembangunan di Provinsi Kaltara sebetulnya telah berjalan melebihi ekspektasi. Kekhawatiran pemekaran akan mengakibatkan kegagalan pembangunan sebelum provinsi tersebut disahkan, tidak semuanya terbukti. Indikator pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat telah menjadi jawaban atas kekhawatiran tersebut.

Dari analisis tipologi Klassen, Provinsi Kaltara masuk dalam kategori provinsi cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*). Provinsi Kaltara memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Namun demikian, kondisi geografis serta masih rendahnya kualitas infrastruktur menjadi hambatan sendiri dalam pembangunan. Perlu dukungan dana tersendiri di luar dana perimbangan untuk pembangunan wilayah perbatasan dalam mendukung kedaulatan negeri.

Info diklat dan edukasi keuangan negara

[facebook](#) www.facebook.com/bppk.kemenkeu [twitter](#) @BPPKKemenkeu
[instagram](#) @BPPKKemenkeu [website](#) www.bppk.kemenkeu.go.id

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Jl. Purnawarman No. 99
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Telp: 021-29054300



*) *Peneliti pada Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal. Artikel ini merupakan pendapat pribadi, dan tidak mewakili institusi di mana penulis bertugas.*

Studi Bahagia di Finlandia

Finlandia adalah negeri yang indah dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Hal ini mendorong Imam Santoso, mahasiswa Indonesia, melanjutkan program doktoral di Aalto University, Helsinki. Dalam wawancara via Skype dengan Media Keuangan belum lama ini, pria yang akrab disapa Imam tersebut berbagi banyak kisah tentang perjuangannya memenangkan beasiswa S1, S2, hingga S3. Terakhir, Imam berangkat ke Helsinki untuk berkuliah dengan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Ayah dan nenek Imam adalah petani di sebuah desa di Jember, Jawa Timur. Sejak kecil, Imam telah ditinggal ibunya yang mangkat karena sakit. Dia tumbuh besar dalam asuhan sang nenek. Meskipun berasal dari keluarga petani, Imam tak pernah kecil nyali. Ketika lulus SMA, anak pertama dari dua bersaudara itu lulus ujian masuk Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Jurusan Teknik Metalurgi. Yang unik, inspirasi untuk menekuni ilmu tentang tambang datang dari salah seorang tetangganya di kampung halaman. “Ada tetangga kami yang bekerja sebagai petugas keamanan di perusahaan tambang di Papua. Waktu itu saya berpikir, bekerja di bidang tambang akan bisa membuat saya menjadi kaya,” ujar Imam berseloroh.

Hari-hari menyelesaikan pendidikan di ITB adalah perjuangan yang keras bagi Imam. Biaya hidup dan pendidikan selama di Kota Kembang berasal dari beasiswa yang datang sambung menyambung. Untuk memperoleh beasiswa itu, Imam harus menjaga prestasi akademik. Tambahan biaya hidup juga dia dapatkan dari hasil bekerja sebagai guru les privat untuk anak-anak sekolah.

Pada 2007, Imam menamatkan pendidikan S1 dengan gelar wisudawan terbaik. Dia membuat ayah dan neneknya bangga dengan berdiri di atas mimbar dan memberikan *valedictorian speech* di antara ribuan wisudawan lainnya. Tak sulit bagi Imam untuk meraih pekerjaan. Berbagai tawaran bahkan datang tanpa harus dia melamar. Namun, Imam justru memilih jalan lain. Kebiasaan mengajar privat membuatnya sadar bahwa di situlah *passion*-nya berada.

Imam kemudian membantu seorang dosen di ITB sebagai asisten dan konsultan proyek-proyek pemerintah. Sambil menyelam minum air, dia menyiapkan diri untuk melanjutkan kuliah S2. “Ternyata cari sekolah susah. Saya harus berjuang untuk mencapai nilai bahasa Inggris yang dipersyaratkan,” ujar Imam. Pada akhir 2008, mimpi Imam untuk melanjutkan studi di luar negeri mulai menemui titik terang. Dia mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan di Australia dengan pembiayaan dari sebuah perusahaan di sana.

Krisis finansial global memisahkan Imam dan mimpinya tak lama kemudian. Perusahaan yang membiayai studinya bangkrut karena terkena dampak krisis itu. Imam pun terpaksa kembali ke tanah air. Namun, Imam tak menyerah. Dia

 **lpdp** Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

kembali mengejar nilai bahasa Inggris dan kemudian mendaftar program beasiswa dari Pemerintah Australia.

Pada awal 2011, Imam terpilih sebagai salah satu penerima beasiswa dan menempuh program S2 di University of Queensland. Setelah lulus dari program tersebut pada 2013, dia langsung menyusun rencana untuk melanjutkan pendidikan di jenjang S3. Nasib baik berpihak pada Imam. Pada 2014, dia lolos beasiswa LPDP. Yang lebih membuat Imam bahagia, pengumuman LPDP nyaris bersamaan dengan kabar dia diterima sebagai dosen PNS di ITB. “Pas saya berangkat ke Finlandia, pas saya dapat pengumuman diterima sebagai PNS,” kata Imam. Hingga saat ini, sudah hampir dua tahun Imam bermukim di negara Skandinavia itu.

Studi bahagia

Finlandia adalah negeri yang sangat nyaman sebagai tujuan melanjutkan pendidikan. “Kampus dan apartemen saya terletak di pinggir danau. Indah sekali pemandangannya di sini,” kata Imam. Di samping itu, Imam juga mendapatkan pengalaman merasakan perubahan musim yang ekstrem. Pada musim panas, matahari nyaris tidak tenggelam, sedangkan pada musim dingin suhu udara bisa mencapai 40 derajat celcius. Yang tak kalah menarik adalah kesempatan untuk melihat fenomena Aurora di atas langit Finlandia.

Bukan hanya keindahan alamnya, Imam juga terkesan dengan sistem pendidikan di sana. Apalagi jurusan Metalurgi di Aalto University yang menjadi fokus studinya menyelenggarakan program terbaik di dunia. Suasana belajar

juga membuat mahasiswa tidak tertekan. Menurut Imam, profesor pembimbingnya memberikan keleluasaan dalam mengatur waktu penelitian. “Yang penting selesai pada waktunya,” ujar Imam. Hubungan antara mahasiswa dan dosen juga sangat egaliter.

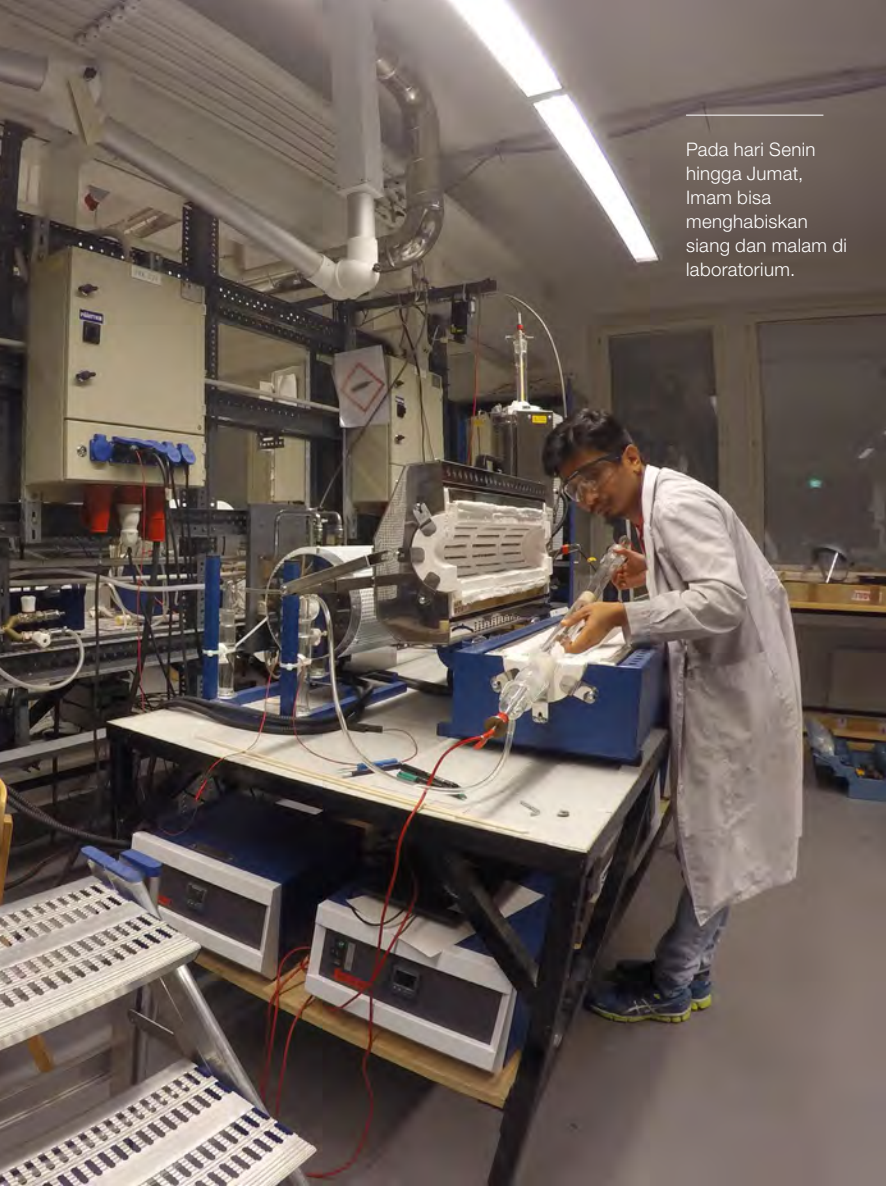
Meskipun kerasan tinggal dan belajar di Finlandia, bukan berarti Imam tak bekerja ekstra keras. Agar bisa mendapatkan gelar PhD, Imam harus menerbitkan empat publikasi internasional dalam empat tahun. “Setiap hari saya melakukan percobaan di laboratorium, mencampur zat A dan B. Perlu kerja keras dan jungkir balik,” kata Imam. Ketika mencampur zat emas dan perak untuk menghitung nilai energinya, bisa jadi Imam tak mendapatkan hasil apapun setelah percobaan berkali-kali. “Setelah sebulan kadang ada hasilnya kadang tidak ada,” tuturnya.

Usaha keras Imam mulai menampakkan hasil gemilang. Selama dua tahun, tiga hasil penelitiannya telah dimuat dalam publikasi internasional. Artinya, dia hanya perlu satu publikasi lagi untuk bisa lulus program doktoral. “Saya akan mencoba menyelesaikan program ini dalam tiga tahun,” kata Imam penuh semangat.

Berbagi inspirasi

Imam menyadari betul bahwa pendidikan telah mengubah jalan hidupnya. Oleh karena itu, dia selalu ingin berbagi kisah dan semangat kepada anak-

Foto
Dok. Pribadi



Pada hari Senin hingga Jumat, Imam bisa menghabiskan siang dan malam di laboratorium.

anak muda dengan latar belakang keluarga yang kekurangan. Sejak masih berkuliah di ITB, Imam telah mendirikan gerakan Ambalu Mengajar. “Saya merasakan bagaimana pendidikan itu sangat mengubah saya dan keluarga,” ujarnya.

Dalam Ambalu Mengajar, Imam dan teman-temannya berusaha mencari donatur bagi anak-anak desa yang memiliki semangat tinggi untuk sekolah. “Kami menjembatani anak-anak desa dengan universitas. Sekarang sudah ada anak-anak dari gerakan kami yang bersekolah di luar negeri dengan beasiswa

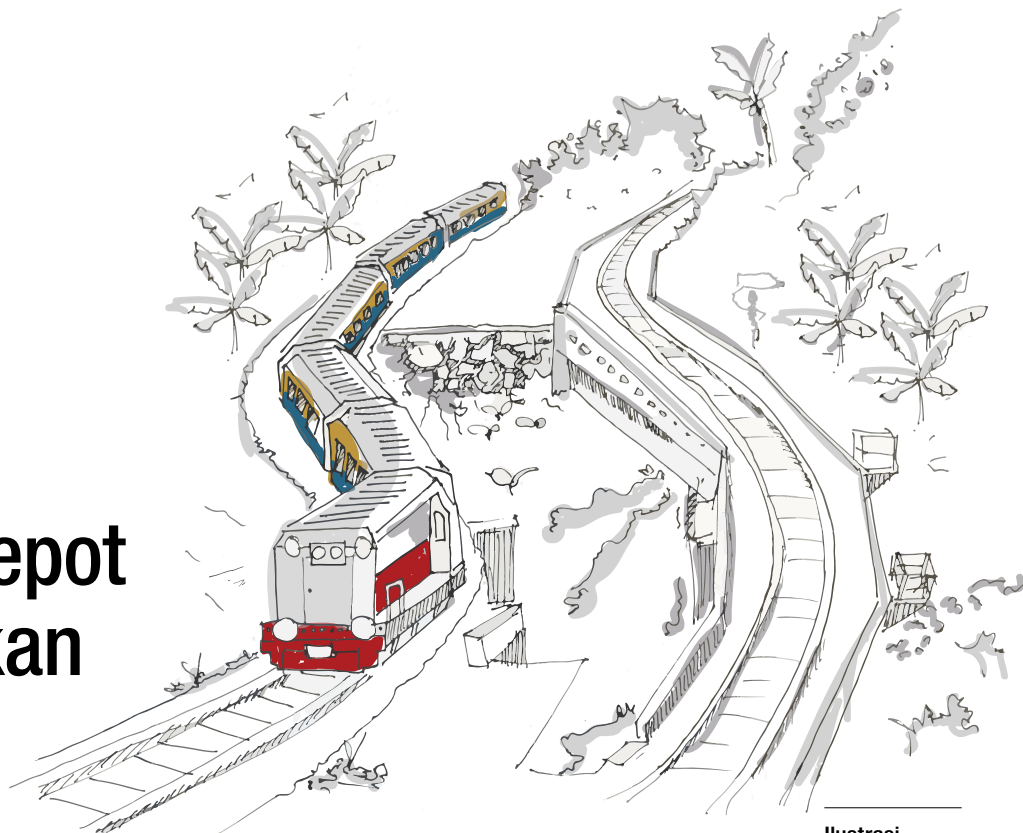
LPDP juga,” kata Imam. Ketika telah menyelesaikan pendidikan S3 nanti, Imam bertekad untuk mengabdikan dirinya dengan menjadi dosen di almamaternya. Di samping mengajar, Imam ingin terus membantu pemerintah membangun industri metalurgi. Imam juga bertekad kuat untuk pulang ke desa dan mencari anak-anak dengan semangat juang tinggi di sana. “Orang desa itu perlu bukti. Saya akan menyebarkan sangat untuk tidak takut bersekolah walaupun tak punya biaya. Ada banyak beasiswa di luar sana,” tuturnya.

Teks Dwinanda Ardhi

Kenapa Repot Menerbitkan Sukuk?

Teks

Dian Handayani, Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko



Ilustrasi
Arfindo Briyan

Saat pembahasan RUU Surat Berharga Syariah Negara pada awal 2008, muncul pertanyaan kenapa harus menerbitkan instrumen berbasis syariah. Jika APBN butuh pembiayaan, terbitkan saja surat utang. Tidak perlu *underlying asset*, tidak perlu *due diligence* konsultan hukum, tidak perlu fatwa dan opini syariah, tidak perlu dokumen transaksi. Tidak perlu repot.

Untuk itu ada beberapa jawaban. Sukuk Negara dapat menyasar kelompok investor baru, seperti dari Timur Tengah

maupun kawasan lain yang menjaga aspek kehalalan investasinya. Semakin beragam instrumen pembiayaan, semakin fleksibel ruang gerak Pemerintah.

Di Indonesia, geliat ekonomi syariah dipicu oleh beroperasinya bank syariah pertama tahun 1992. Perlahan tapi pasti industri pasar modal syariah mulai bergerak. Dari pembentukan Jakarta Islamic Index hingga penerbitan Sukuk oleh Indosat. Penerbitan Sukuk Negara menunjukkan upaya Pemerintah untuk mengembangkan pasar keuangan syariah.

Perhatian pasar internasional

juga tertuju pada instrumen ini. Sukuk memberi imbal hasil tetap karena berbasis sewa dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Negara-negara barat turut berlomba-lomba menerbitkan instrumen ini dan menjadi *global Islamic financial hub*.

Selain itu, sukuk yang dalam penerbitannya harus berbasis aset riil, tepat untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Setelah UU SBSN No. 19 Tahun 2008 disahkan, Pemerintah melanjutkan diskusi untuk melengkapi *legal basis* yang diperlukan.

Tujuannya menempatkan Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan proyek infrastruktur.

Sukuk Negara untuk Pembiayaan Proyek

Meski PP No. 56 tahun 2011 dan Fatwa DSN-MUI sudah tersedia, namun aturan teknis pelaksanaannya baru terwujud tahun 2013. Pembangunan rel kereta api jalur ganda rute Cirebon Kroya (Cikro) menjadi proyek pertama yang mendapat alokasi DIPA langsung dari Sukuk Negara. Artinya hasil penerbitan Sukuk Negara dialokasikan (*earmarked*) dari sisi administrasi penganggaran, biaya, maupun manajemen proyek dan evaluasinya ke proyek tersebut. Sampai 2016 sudah ada proyek bernilai Rp23 triliun yang di-*earmarked* langsung dengan Sukuk Negara.

Berbagai dinamika di lapangan terus dievaluasi untuk menyempurnakan aturan-aturan teknisnya. Sejak akhir 2015 berturut-turut ditetapkan PMK No. 220/2015, No. 25/2016, dan 120/2016 yang masing-masing mengatur tata cara pembiayaan proyek/kegiatan dengan Sukuk Negara, tata cara pembayaran kegiatan yang dibiayai dengan Sukuk Negara, serta tata cara *monitoring* dan evaluasi.

Repot Namun Sepadan

Menuju satu dekade, Sukuk Negara sudah mengantongi berbagai capaian. Di pasar internasional, Indonesia dikenal sebagai *frequent issuer* Sukuk Global yang kehadirannya selalu dinanti *qualified institutional buyers*. Sukuk Global yang diterbitkan Pemerintah Indonesia juga

diterima oleh investor-investor negara Islam Porsi pembelian investor dari kawasan tersebut terus meningkat dalam persentase maupun volume.

Di pasar domestik, *outstanding* Sukuk Negara telah mencapai Rp400 triliun per akhir September 2016. Sukuk Ritel merupakan satu-satunya produk investasi syariah khusus untuk investor ritel yang ditawarkan secara berkala. Sejak penerbitan perdananya, pertumbuhan jumlah investor Sukuk Ritel meningkat dari 14.295 investor pada 2009 hingga 48.444 investor pada 2016.

Awal September 2016 hadir Sukuk Tabungan dengan minimal pembelian lebih kecil. Hasil penerbitan perdananya menunjukkan 47 persen pembeli merupakan investor ritel yang melakukan pembelian pada kisaran Rp2–Rp50 juta. Sukuk Negara, khususnya melalui Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan, telah memicu timbulnya kesadaran mengenai investasi syariah yang aman dan menguntungkan di kalangan masyarakat.

Jalan Masih Panjang

Sejarah keuangan syariah di Indonesia dimulai sejak awal 1990. Sejak saat itu, setiap komponen di dalamnya mencari cara masing-masing untuk tumbuh dan berkembang. Pada akhir tahun 2015 Pemerintah meluncurkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (Masterplan AKSI) yang memuat peta jalan untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sistem keuangan syariah agar berperan makin signifikan dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Menurut Masterplan AKSI, Sukuk memiliki dua kekuatan penting. Pertama, dari sisi *demand* kehadiran Sukuk Ritel dipandang sebagai bukti besarnya potensi pasar ritel yang menjadi keunggulan Indonesia. Kedua, dari sisi *supply* Sukuk memiliki potensi besar sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur yang dapat menjawab kebutuhan negara ini.

Kebutuhan pembangunan infrastruktur telah menciptakan berbagai inovasi dalam instrumen pembiayaan. Tidak hanya Indonesia, negara-negara di berbagai benua juga terus mencari instrumen pembiayaan yang mempertemukan kebutuhan pembiayaan dengan preferensi investor. Berkaca pada Masterplan AKSI, investor ritel menjadi kekuatan yang dapat diperhitungkan untuk memobilisasi dana melalui Sukuk. Inovasi dalam instrumen Sukuk untuk investor ritel dapat terus dieksplorasi agar selaras dengan kebutuhan pembiayaan.

Di sisi lain, beban APBN yang semakin padat membuka peluang untuk terus mencari inovasi pembiayaan. Pengembangan skema *hybrid* antara pembiayaan *public private partnership* dengan Sukuk dapat dieksplorasi. Sekuritisasi proyek melalui penerbitan Sukuk dapat menarik para investor di pasar keuangan, sehingga tidak terbatas pada satu dua investor saja. Bila dibutuhkan dukungan penjaminan untuk peningkatan kredit, hal itu pun telah termuat dalam Masterplan AKSI. Selanjutnya perlu mencari mekanisme yang tepat agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Cukai Tembakau sebagai Pengendali Konsumsi Rokok



Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Pasca maraknya wacana terkait kenaikan tarif cukai tembakau, pemerintah akhirnya melakukan perubahan aturan tarif cukai yang berlaku mulai 1 Januari 2017. Rata-rata kenaikan tarif baru adalah sebesar 10,54 persen. Diketahui kenaikan tertinggi sebesar 13,46 persen berlaku untuk rokok jenis hasil tembakau sigaret putih mesin. Sementara kenaikan tarif cukai terendah sebesar nol persen berlaku untuk sigaret kretek tangan. Kebijakan yang ditempuh pemerintah ini sekaligus menaikkan harga jual eceran (HJE) rokok dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,26 persen.

Kebijakan terkait tarif baru untuk cukai tembakau ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Kebijakan yang diundangkan pada 4 Oktober 2016 tersebut bertujuan untuk mengendalikan produksi rokok, sekaligus

sebagai salah satu pos penerimaan dalam APBN 2017.

Tarif berdasarkan Jenis dan Golongan

Melalui PMK Nomor 147/PMK.010/2016, Menteri Keuangan menetapkan batasan HJE dan tarif cukai berdasarkan jenis dan golongan pengusaha pabrik tembakau. Penggolongan pengusaha pabrik merujuk pada PMK Nomor 179/PMK.011/2012 yang mengelompokkan pengusaha pabrik hasil tembakau menjadi sembilan kategori berdasarkan jenis dan jumlah produksi hasil tembakau. Hal ini sesuai dengan dokumen pemesanan pita cukai pabrik yang bersangkutan, baik dalam satu lokasi pengawasan atau beberapa lokasi pengawasan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan jenis dan jumlah yang diproduksi, pengusaha digolongkan menjadi pengusaha sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan (SKT) atau sigaret putih

tangan (SPT), sigaret kretek tangan filter (SKTF) atau sigaret putih tangan filter (SKTF), tembakau iris (TIS), rokok daun atau klobot (KLB), sigaret kelembak menyan (KLM), cerutu (CRT), dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

Berdasarkan jumlah produksinya, terdapat kenaikan jumlah minimal produksi dalam PMK Nomor 147/PMK.010/2016. Pada PMK sebelumnya, yakni PMK Nomor 179/PMK.011/2012, pengusaha SKM, SPM, dan SKTF atau SPTF dikategorikan golongan I apabila memproduksi lebih dari 2 miliar batang. Sementara pada PMK Nomor 147/PMK.010/2016, batasan jumlah produksi bagi pengusaha pabrik SKM, SPM, SKT atau SPT, SKFT atau SPTF golongan I ditetapkan lebih dari 3 miliar batang.

Hal yang juga diatur dalam PMK Nomor 147/PMK.010/2016 adalah perbedaan HJE dan tarif cukai untuk hasil tembakau buatan dalam negeri dan hasil tembakau yang diimpor. Terkait hal ini, tarif cukai buatan dalam negeri untuk golongan I sama dengan tarif cukai hasil tembakau yang diimpor, sedangkan tarif cukai yang sama diberlakukan untuk jenis sigaret yang golongannya tidak dibedakan (TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL).

Dengan aturan baru tersebut, batasan HJE terendah dikenakan untuk rokok jenis KLM, sedangkan HJE tertinggi dikenakan untuk jenis CRT. Besar HJE untuk rokok jenis KLM adalah sebesar Rp200 per batang dengan tarif cukai Rp22. Sementara itu, HJE untuk rokok jenis CRT dikenakan lebih dari Rp198.000 dengan tarif cukai Rp110.000 per batang.

Ilustrasi
Arfindo Briyan

Masa Transisi

PMK Nomor 147/PMK.010/2016 berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 4 Oktober 2016. Namun, ketentuan untuk batasan jumlah produksi, batasan HJE dan tarif cukai per batang atau per gram, baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang diimpor, baru berlaku sejak 1 Januari 2017. Sejak diundangkan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai harus menetapkan kembali tarif cukai dan HJE dengan syarat tidak lebih rendah dari tarif cukai dan batasan HJE yang ditentukan.

Adapun untuk pelayanan pita cukai, dapat menggunakan penetapan kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai. Batas waktu pelekatan pita cukai yang telah dipesan adalah sampai dengan tanggal 1 Februari 2017.

Penutup

Sebelum PMK Nomor 147/PMK.010/2016 ditetapkan, beredar wacana kenaikan harga rokok menjadi Rp50.000 per bungkus. Wacana tersebut berasal dari hasil studi Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, FKM UI yang menyatakan bahwa strategi menaikkan harga dan cukai rokok terbukti efektif menurunkan jumlah perokok di beberapa negara. Isu tersebut telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Masyarakat yang pro terhadap isu kesehatan meyakini tarif tinggi efektif menurunkan jumlah perokok. Namun kalangan lain menilai kenaikan tarif

cukai yang tinggi dapat meningkatkan jumlah rokok ilegal. Tingginya permintaan konsumen berbenturan dengan rendahnya kemampuan konsumen untuk membeli rokok bisa dimanfaatkan produsen rokok ilegal untuk meraup keuntungan. Maraknya peredaran rokok ilegal tentu menyulitkan pemerintah dalam mengendalikan peredarannya. Selain itu, tingginya kenaikan cukai tembakau dinilai dapat memberangus keberlangsungan industri rokok. Hal ini akan berimbas pada sekitar enam juta tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada industri tersebut.

Dalam menghitung formula tarif cukai tembakau, pemerintah mempertimbangkan arah penyederhanaan per layer kategori pengusaha, sensitivitas harga per layer, jenis hasil tembakau, dan golongan pabrik. Sementara penentuan besaran kenaikan tarif cukai didasarkan pada kesinambungan lima aspek, yaitu kesehatan, tenaga kerja, penanganan rokok ilegal, aspek penerimaan negara, dan *earmarking* (pengalokasian anggaran untuk perubahan industri rokok dari sisi kesehatan). Melalui formula tersebut, kebijakan cukai menjadi alat untuk membatasi konsumsi rokok, sekaligus mendongkrak tercapainya target penerimaan cukai hasil tembakau dengan tidak mematikan industri yang telah menghidupi jutaan masyarakat.

Teks Budi Sulistyio

Sebuah Asa di Balik Chiffon Jogja

Di sela-sela menjalankan tugas sebagai pegawai front office, Asih tekun menggeluti hobinya hingga beromzet ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Ia bak membuktikan sebuah pepatah, *follow your passion and your money will follow*.

Di balik kesuksesan usaha toko roti dan kue yang dirintis Wiji Asih Setiawati, ada perjuangan panjang berliku. Pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta ini terus konsisten menekuni hobi yang kini telah membuatnya menjadi wirausahawati andal. Tak hanya butuh keseriusan dan tekad tinggi, Asih, sapaan akrabnya, pun harus pandai membagi waktu.

Saat berselancar di dunia maya, Media Keuangan sempat menemukan salah satu blog (laman pribadi) yang memberikan testimoni tentang penulis blog tersebut saat mencicip *chiffon cake* Alif’s Bakery. Ternyata, tak sulit menemukan informasi di dunia maya tentang toko roti dan kue yang dirintis sejak November 2010 tersebut. Usaha yang sukses menjadikan *chiffon cake* (roti bertekstur halus) sebagai produk andalan ini memang laris manis di Yogyakarta.

Usaha Asih bermula dari kegemarannya membuat kue kering semasa berkuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). “Ada yang suka (kue saya) saja saya sudah senang sekali,” kenangnya. Setelah lulus kuliah pada tahun 1998, istri dari Sulistyو Hadi Utomo ini ditempatkan di Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA) di Bengkulu. Tahun 2004, Asih pindah ke Yogyakarta mengikuti suami bertugas. Setelah beberapa kali berpindah dari KTUA Yogyakarta, Kanwil DJPB Yogyakarta, kini Asih bertugas di KPPN Yogyakarta. Di

Kota Gudeg inilah Asih bertemu dengan berbagai komunitas pembuat roti dan kue.

Suatu ketika di tahun 2009, salah seorang teman kantor memesan 60 loyang roti untuk hantaran ke tetangga. Asih menyambut pesanan ini dengan gembira. Ia pun bergegas ke pasar membeli kotak kue dan membuat cap. Tak disangka, roti yang terbungkus dengan kotak sederhana itu mendapat tanggapan positif. Beberapa tetangga yang mendapat roti tersebut pun memesan beberapa loyang. “Promosinya hanya dari mulut ke mulut,” ujarnya. Sejak itu, pesanan roti untuk hantaran kian mengalir.

Saat ini Alif’s Bakery telah memiliki outlet tersendiri di Jalan Rajawali Yogyakarta. Dengan adanya outlet yang didesain modern ini, Asih berharap pembeli tidak hanya mendapatkan kepuasan rasa roti dan kue buatannya, namun juga pelayanan yang memuaskan. Tak hanya itu, selain telah meresmikan outlet pada Maret 2016, Asih juga menyewa *professional baker* yang memastikan proses pembuatan roti dan kue berjalan dengan baik. Sebelum berupa outlet, Alif’s Bakery hanya berupa sebuah rumah produksi yang tidak terlalu luas.

Outlet dan cabang baru

Bagi wanita kelahiran 24 Juni 1977 ini, tahun 2016 merupakan babak baru bagi perjalanan Alif’s Bakery. Setelah membuka outlet pada Maret lalu, Asih membuka outlet kedua di Klaten pada 12

Oktober silam. “Saya melihat Klaten punya pasar yang cukup potensial. Pelanggan kami juga banyak yang berasal dari sana. Padahal (jarak tempuh) dari Klaten ke Jogja lumayan jauh, sekitar satu jam,” tambahnya.

Kini kesibukan Asih berbeda dengan beberapa tahun silam. Jika dulu Asih yang terjun langsung dalam proses pembuatan roti dan kue, kini kegiatan operasional dilakukan oleh karyawannya yang berjumlah 45 orang. Asih berkecimpung dalam urusan manajemen Alif’s Bakery yang terus melebarkan sayap. Dalam manajemen Alif’s Bakery, setiap produk berada di bawah tanggung jawab satu orang admin. Total saat ini ada empat orang admin, yaitu admin roti hantaran (*chiffon cake*), roti manis (*pastry*), *cake*, dan *snack*. “Setiap malam saya bersama para admin bertukar pikiran mengenai permasalahan yang muncul dan mencari solusi,” ujarnya.

Ditanya mengenai rahasia sukses bisnisnya, Asih mengaku mendapat banyak ilmu dan pengalaman dari komunitas wirausaha di Yogyakarta. Ia juga mengikuti program pembinaan dari seorang coach selama dua tahun lebih. Saat itu, coach (pembina) tersebut menantang Asih untuk menaikkan omzet melampaui target. Dengan penuh optimis dan perjuangan, Asih akhirnya bisa melampaui omzet lebih dari 1 miliar dalam kurun enam bulan. Usaha Asih mendapat apresiasi dalam acara Gebyar Wirausaha di Malang pada

"Saya senang bisa memberi manfaat buat orang lain."

Wiji Asih Setiawati

September lalu dengan kategori wirausaha yang mengalami lonjakan omzet lebih dari dua kali lipat.

Chiffonnya Jogja

“Saya senang bisa memberi manfaat buat orang lain,” tutur Asih mengenai hal paling berkesan selama merintis bisnis. Hobi merupakan satu-satunya alasan Asih terus konsisten menjalankan Alif’s Bakery. Tanpa didasari hobi, semua kendala yang dihadapi pasti akan mematahkan semangat ibu dua putra ini. Kini, toko roti dan kue yang mengusung *tagline* “Chiffonnya Jogja” dan “The Taste You Can Trust” ini sukses menjadi rujukan pertama masyarakat Yogyakarta yang mencari kue hantaran.

Di balik kesuksesan Asih, ada pula kisah jatuh bangun dalam merintis

Foto Arfindo Briyan

usaha roti dan kue ini. “Dulu saya pernah menyewa tempat di Jalan Wonosari, Jogja. (Dalam) sehari tidak ada penjualan,” kenangnya sembari tertawa. Kala itu, Asih mencoba membuat roti unyil (roti manis berbentuk mini) yang ternyata kurang mendapat respon dari masyarakat. Bayangkan bila saat itu Asih langsung menyerah menghadapi kenyataan, tidak akan ada cerita Alif’s Bakery yang sukses menghidupi puluhan karyawan.

Kunci kesuksesan tentu bermula dari manajemen waktu yang tepat. Begitu pula yang menjadi pegangan Asih yang sehari-hari bertugas di bagian *front office* KPPN Yogyakarta ini. Rapat dengan para admin dan karyawannya baru bisa dilakukan di malam hari sepulang kantor. Di akhir pekan, Asih justru semakin

disibukkan mengurus toko roti dan kue. “*Alhamdulillah* keluarga sangat mendukung,” tutur ibu dari Alif Zaidan Utomo dan M. Fatihan Zakwan ini.

Alif’s Bakery memiliki visi usaha berbeda dibandingkan dengan bisnis usaha lainnya. Di saat bisnis usaha lainnya berlomba-lomba mencari keuntungan semata, Alif’s Bakery justru mencari keuntungan demi kesejahteraan karyawan dan membiayai dana pendidikan anak asuh. “Saya ingin membangun sebuah pondok,” ujar Asih. Pendanaan sebuah pondok (sekolah berbasis agama Islam) biasanya berasal dari donasi masyarakat. Kelak Alif’s Bakery bercita-cita bisa mendanai sekolah tersebut tanpa mengandalkan para donatur. “Saya hanya ingin usaha ini menjadi lebih *barokah*,” kata Asih mantap.

Teks Pradany Hayyu

Asupan dan Kualitas Diri

Kita tentu ingat bagaimana Ibu mempersiapkan makanan bagi keluarganya. Bahan masakan yang digunakan sengaja dipilih yang paling segar, paling bersih, dan paling banyak kandungan gizinya. Hal ini demi memastikan bahwa keluarganya hanya mengonsumsi yang terbaik bagi tubuh, sehingga berimbas pada kesehatan fisik seperti yang diharapkan.

Kita adalah apa yang kita konsumsi. Hal ini sepatutnya tidak terbatas pada apa yang kita berikan bagi fisik saja. Sebab tubuh tidak semata bagian fisik. Ada jiwa dan pikiran yang turut andil dalam kerja besar kehidupan seorang manusia. Sayangnya, kesehatan jiwa dan pikiran barangkali adalah hal yang paling sering kita lupakan.

Seperti halnya fisik, jiwa dan pikiran juga membutuhkan asupan yang berkualitas. Jika tubuh membutuhkan makanan yang sehat dan bergizi, maka demikian juga yang dibutuhkan jiwa



dan fisik kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, serta apa yang kita baca, semuanya masuk ke dalam tubuh dan memiliki pengaruh bagi jiwa dan pikiran kita.

Untuk itu, sudah selayaknya kita hanya memasukkan apa-apa yang baik saja, bagi jiwa dan pikiran kita. Hal-hal yang bisa memberi pengaruh negatif sudah selayaknya kita tinggalkan. Kita perlu menjaga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita baca. Meski terkadang ketiganya bisa masuk tanpa bisa kita cegah sebelumnya. Namun tentu ada lebih banyak yang berada dalam kendali kita.

Dewasa ini begitu banyak tontonan, lagu, bacaan, dan barangkali obrolan yang tidak hanya nihil manfaat, tetapi juga bisa merusak jiwa dan pikiran kita. Acap kali hal ini justru kita nikmati di sela-sela kesibukan rutinitas kita. Menjadi hal yang biasa, sehingga bukan mustahil ia bisa berpengaruh pada cara pandang, pola

pikir, respons, hingga kepribadian kita. Padahal, melakukan pemilahan atas informasi apa yang masuk ke dalam indera kita adalah sebetulnya upaya untuk menghargai diri kita sendiri. Semakin berharga hal-hal yang kita konsumsi, semakin berharga pula kita menilai diri sendiri. Silakan mendaftar sendiri hal-hal apa yang bisa merusak jiwa dan pikiran kita, lalu berupayalah untuk menghindarinya.

Dengan ini, kita sudah bisa menilai seberapa berharga apa diri kita serta sejauh mana kita menghargai diri kita sendiri. Hal ini juga berlaku bagi anak-anak kita. Generasi di belakang kita yang saat ini tidak punya kemampuan untuk memilah sendiri informasi yang diperolehnya. Maka adalah kewajiban bagi kita untuk memastikan bahwa informasi terbaiklah yang masuk ke dalam indera anak-anak kita. Namun, bila hingga kini kita tidak pandai memilah, bagaimana mungkin kita melakukannya untuk anak-anak kita?

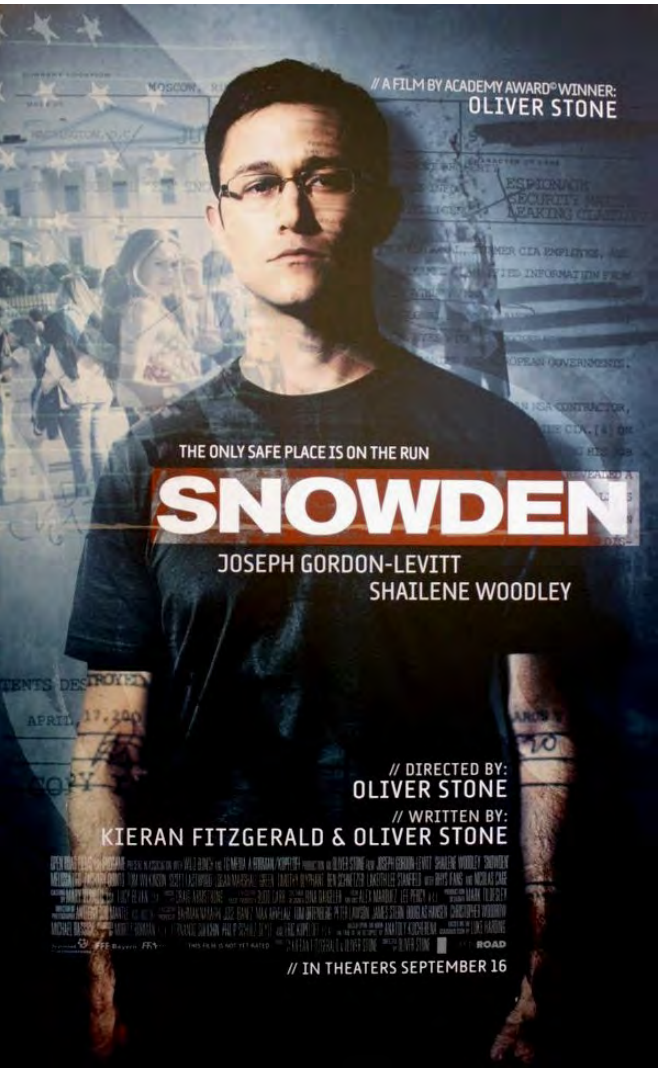
Teks Farida Rosadi

SNOWDEN: Sang Jenius Yang ‘Berkhianat’

Walaupun tidak begitu banyak diperbincangkan di tanah air, Edward Snowden telah menjadi sosok yang kontroversial selama setidaknya tiga tahun terakhir. Mantan pegawai *Central Intelligence Agency* (CIA) ini menjadi tajuk utama berita-berita di dunia karena membocorkan informasi rahasia tentang intelijen Amerika Serikat (AS), serta—yang terpenting—menunjukkan kepada khalayak bahwa komunikasi pribadi yang selama ini masyarakat lakukan di seluruh penjuru dunia melalui telepon seluler dan internet telah disadap oleh intelijen AS.

Film “Snowden” karya Oliver Stone ini dirangkai menjadi suatu biografi politik yang mengikuti jejak Edward Snowden sejak ia masuk CIA hingga ia menjadi buronan AS. Edward Snowden, yang diperankan oleh aktor Joseph Gordon-Levitt dengan meyakinkan, adalah seorang jenius komputer yang bekerja di CIA dan di *National Security Agency* (NSA). Selama bekerja, Snowden menemukan bahwa semua percakapan, komunikasi, dan informasi pribadi seseorang nun jauh di suatu belahan dunia selama ini direkam oleh intelijen AS. Semua informasi ini membentuk suatu bank data yang luar biasa besarnya, yang dimanfaatkan untuk melindungi negara dari terorisme. Snowden merasa ini telah menyalahi hak asasi manusia, dan melalui suatu pertemuan rahasia dengan jurnalis situs berita *The Guardian*, ia “mengkhianati negara” dengan membocorkan dokumen-dokumen rahasia NSA agar masyarakat mengetahui.

Oliver Stone menjadikan rusaknya hubungan asmara Snowden dan kekasihnya Lindsay (diperankan oleh Shailene Woodley) sebagai motivasi awal mengapa Snowden tergerak untuk melakukan tindakan tersebut, dan menurut saya ini langkah yang bagus dari sang pembuat film untuk menjadikan kisah ini lebih manusiawi dan dekat. Kenyataan bahwa hingga saat ini Snowden hidup berpindah-pindah mencari suaka di negara lain



juga dijabarkan dalam film, dan penonton pun dibebaskan untuk menilai Snowden sebagai pahlawan atau pengkhianat. Sayangnya, jalan cerita film ini pelik sehingga di pertengahan film penonton mungkin merasa bosan.

Namun, saya rasa “Snowden” adalah film yang penting untuk ditonton, agar masyarakat tidak hanya mengetahui siapa itu Edward Snowden tetapi juga memahami betapa penyadapan besar-besaran atas nama keamanan negara itu menyalahi hak asasi masyarakat akan kerahasiaan informasi pribadi. Sedikit-banyak, film “Snowden” juga membawa kengerian: jangan-jangan semua pesan teks, media sosial, rekaman video, dan percakapan telepon yang selama ini kita lakukan sembunyi-sembunyi, ternyata terekam dan tersimpan dengan baik—dan dilihat seseorang yang sama sekali tak kita kenal.

Peresensi Akbar Saputra



Jalan jalan

Kalimbuang Bori.



Kete' Kesu.

Toraja Inang Mellong, Toraja Memang Keren

Turis-turis mancanegara asyik membaca *Lonely Planet*, kitab suci *backpacker* dunia di pinggir jalan. Sebagian lainnya sedang berkonsultasi tentang perjalanan wisata di pusat informasi. Ada juga yang sibuk memotret kegiatan perdagangan di pasar Rantepao. Pemandangan ini adalah pengelihan sehari-hari di pusat kota Rantepao, ibukota Kabupaten Toraja Utara. Sesuai dengan slogan Dinas Pariwisata setempat “Toraja Mendunia”, keeksotisan alam dan budaya di Kabupaten ini memang termasyhur ke segala benua.

Akomodasi menuju Toraja dari Makassar cukup mudah. Perusahaan-perusahaan otobus berlomba-lomba menghadirkan armada baru. Fasilitas dan kenyamanan bus-bus ini tidak akan membuat perjalanan jauh Anda terasa melelahkan. Biasanya bus ini berangkat dua kali sehari, setiap jam sembilan pagi dan sembilan malam.

Sampai di Toraja, Anda akan disuguhkan lanskap pegunungan berhawa sejuk khas dataran tinggi. Transportasi dan akomodasi sudah tak perlu dipusingkan. Persewaan motor dan mobil banyak tersedia. Untuk perjalanan jarak dekat, masyarakat punya kendaraan khas berupa becak motor yang murah dan dapat diandalkan. Penginapan murah hingga hotel berbintang juga bisa dengan mudah ditemukan ketika menginjakkan kaki di kota dengan *landmark* patung salib besar ini.

Kete' Kesu merupakan tujuan wisata yang paling dekat dengan Rantepao. Jaraknya hanya 2,5km dari pusat kota. Dalam bahasa Toraja, Kete' Kesu berarti pusat kegiatan. Tempat ini memiliki kuburan tua yang berada di sebuah tebing dan gua. Kita bisa melihat jejeran tengkorak manusia asli yang sebagian “terserak” di dinding gua. Jajaran rumah adat Tongkonan di pelataran menambah

keindahan tebing di pedesaan yang terasa sakral.

Jika belum puas belajar tentang budaya Toraja, Anda bisa meneruskan wisata ke Londa. Di sini lagi-lagi ditemui situs makam di tebing dan gua. Bedanya, di sini Anda bisa menyewa lampu pijar dan seorang pemandu wisata untuk menelusuri gua. Cukup dengan Rp30 ribu untuk sewa lampu dan dan tip seikhlasnya untuk pemandu, Anda bisa banyak bertanya dan mengenali Londa dengan lebih rinci. Situs makam ini khusus digunakan oleh marga To Lengke, salah keluarga bangsawan di Toraja. Banyak sekali peti jenazah tersimpan di ceruk-ceruk goa. Mulai dari yang sudah remuk dan lapuk, hingga yang terbilang masih baru.

Situs megalitikum lain yang wajib dikunjungi adalah Bori Kalimbuang. Hamparan rumput hijau dengan tongkonan-tongkonan megah mengelilingi deretan menhir yang menyembul tinggi dari dalam tanah. Menhir-menhir ini dibuat dalam upacara Rambu Solo untuk menghormati meninggalnya pemuka adat atau bangsawan Toraja.

Di situs yang berjarak 15km dari pusat kota ini, terdapat sebuah batu raksasa dengan tinggi tiga kali orang dewasa yang dijadikan makam. Batu tersebut dilubangi dan dipasang tanduk kerbau pada setiap lubangnya. Satu lubang digunakan untuk makam satu keluarga. Selain situs budayanya, Bori Kalimbuang juga menawarkan keindahan alam pedesaan yang dikelilingi hutan bambu yang asri.

Toraja tak melulu soal makam. Banyak lokasi lain yang menjadi pilihan, misalnya Lolai. Tempat ini mendapat julukan negeri di atas awan karena kita dapat melihat hamparan awan dari atas pegunungan. Pengunjung dianjurkan untuk datang sebelum matahari tinggi, agar kumpulan awan masih tebal dan belum berganti dengan kabut putih pekat.

Teks dan Foto Yogi Bayu Avian, Pegawai Direktorat Pajak

Akhir Perjalanan Supernova

“ni yang terakhir. Setelah ini, tidak ada lagi serial Supernova,” ungkap Dewi ‘Dee’ Lestari pada Festival Literasi Kemenkeu, di Jakarta Kamis (15/9) lalu. Dalam bedah buku Intelegensi Embun Pagi, Dee bercerita tentang perjalanan buku keenam sekaligus episode penutup heksalogi Supernova yang pertama kali dirilis 15 tahun silam.

Selama dua jam, kompleksitas semesta Supernova dan tema besar spiritualisme yang menjadi nyawa Supernova diurai wanita kelahiran Bandung, 20 Januari 1976 ini dengan bahasa sederhana. Berbagai pertanyaan tentang eksistensi manusia di bumi menggugah putri pasangan Yohan Simangunsong dan Tiurlan br Siagian ini untuk mencari jawaban melalui 99 keping (chapter) dalam serial tersebut.

Mantan personil group RSD ini mengakui bahwa riset mendalam merupakan kunci utama hingga Supernova lahir menjadi sebuah karya sarat informasi. Seri novel fiksi ilmiah ini membuktikan bahwa ia mampu menjadi ladang ilmu pengetahuan yang melintasi segala genre.

Foto
Dok. Biro KLI



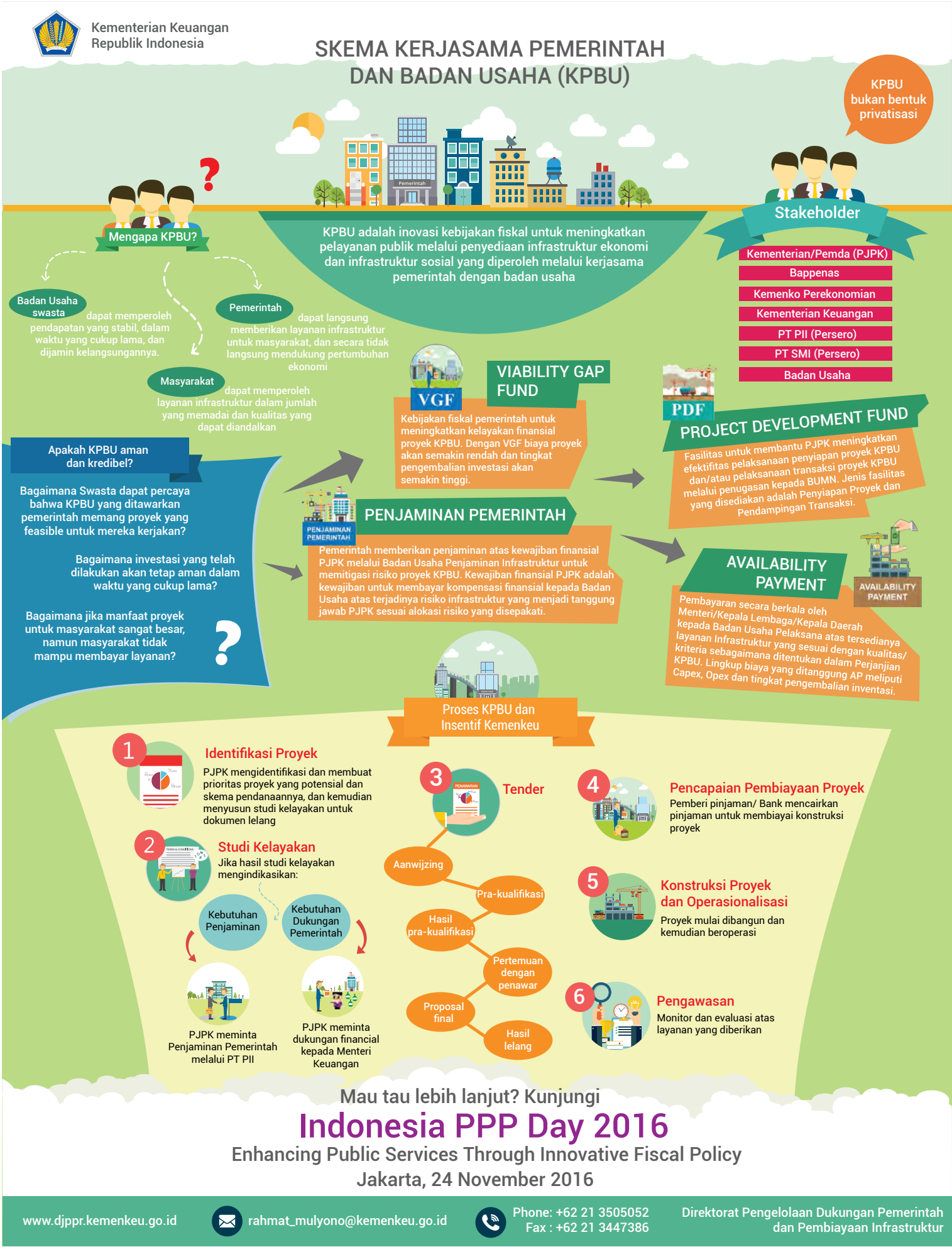
Mulai dari bahasan mengenai kucing schrodinger, orang utan, jamur, *enteogen*, bahkan hingga pembahasan tentang alien, *hyperspace*, *lucid dream*, maupun bangsa sumeria. Serial Supernova juga berupaya mengajak para pembaca setianya ikut berkembara ke hampir seluruh bagian dunia, dari Bandung, Sianjur mula-mula, Tanjung Putting, Indocina, New York, Tibet, China, Peru, London hingga ke benua Afrika.

Bagi para *addiction* – sebutan bagi pecinta karya Dee, buku Intelegensi Embun Pagi (IEP) sangat istimewa. Di sini, seluruh karakter yang pernah muncul dalam karya sebelumnya berkumpul bersama untuk menjalankan misi yang mempengaruhi umat manusia.

Bila dibandingkan buku pertama Supernova, yaitu Kstaria, Putri, dan Bintang Jatuh (KPBJ), IEP nampak tumbuh secara perspektif. Dalam KPBJ, Dee menampilkan sisi hidup manusia-manusia yang *abu-abu*. Sebaliknya, Dee membuat dua kubu hitam putih yang saling berperang menjadi plot utama pada IEP. “Unsur hitam putih, *yin* dan *yang* diperlukan dalam hidup. Ini akan saya jelaskan di buku berikutnya,” jelas Dee, sedikit memberikan bocoran.

Meskipun disebut sebagai penutup kisah, akhir buku IEP menyuguhkan awal kisah baru yang membuka ruang kisah lanjutan Supernova, meski tidak lagi menggunakan nama yang sama. Ketika ditanya mengenai peristiwa puncak yang disebut akan terjadi 17 tahun setelah akhir IEP (ber-setting tahun 2003), Dee hanya tersenyum penuh makna dan berkata, “2020 ya? Saya sudah merencanakan semuanya. Semua sudah saya pikirkan.”

Teks Citra Handayani



MEMPERINGATI HARI POHON

photo: Iin Kurniati



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA